

JARINGAN SEKOLAH
PP IPNU

IPNU BACK TO SCHOOL

PEDOMAN KOMISARIAT SEKOLAH




Media Center IPNU

www.ipnu.or.id


I.P.N.U



JARINGAN SEKOLAH
PP IPNU

IPNU BACK TO SCHOOL

PEDOMAN KOMISARIAT SEKOLAH




Media Center IPNU

www.ipnu.or.id



PEDOMAN KOMISARIAT
PIMPINAN PUSAT
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA

Penangung Jawab:
Aswandi Jailani (Ketua Umum)

Pengarah :
Mufarrihul Hazin (Sekretaris Umum)
Maulana Nur (Bendahara Umum)

Penyusun:
Abu Hasan Asy'ari
Kaspun Nazir
Wachid Evanto

Design Cover:
Musthofa Zaenur Rohman

Diterbitkan oleh: Sekretariat Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Gedung PBNU Lantai 5 Jl. Kramat Raya No.164 Jakarta Pusat 10430 Telp (021) 3156480 / 08155555754 email: setjen.ppipnu@gmail.com website: www.ipnu.or.id

KATA PENGANTAR
PIMPINAN PUSAT IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Bissmilahirrahmannirrahim

Syukur Alhamdullilah kehadirat Allah SWT atas kelancaran dan kemudahan baik dalam penyusunan "Buku Pedoman Komisariat" yang digagas oleh Jaringan Sekolah PP IPNU mauaupun kebesyukuran atas banyak harapan yang muncul agar buku ini mampu diaktualisasikan oleh setiap Anggota dan Kader IPNU dimanapun berada. Sholawat dan Salam tetap kami haturkan kepada Baginda Nabi Muhamad SAW, seorang yang mampu mengantarkan umat manusia agar belajar menjawab tuntutan peradaban setiap zaman.

Abad Milenial ini, IPNU tidak hanya dituntut untuk menguatkan ideologi tapi juga mesti menjawab berbagai tantangan yang muncul. Meskipun sudah meneguhkan komitmennya pada gerakan kepelajaran, namun belum dianggap cukup untuk menjawab kebutuhan kembali ke pelajar secara total. Kegelisahan ini memuncak pada Kongres XIV IPNU dan XIII di Sukolilo Surabaya. Kongres yang berlangsung pada 18-24 Juni 2003 lalu itu telah menorehkan sejarah baru bagi perjalanan badan otonom NU ini. Pada Kongres itulah setelah melalui perdebatan yang sangat panjang, tercapai kesepakatan untuk mengembalikan IPNU pada khittahnya, yaitu kembali menjadi organisasi pelajar.

IPNU uang semula berkepanjangan Ikatan Putra Nahdlatul Ulama, berubah lagi menjadi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama.

Babak baru perjalanan IPNU dimulai. Keputusan mengembalikan IPNU ke pelajar dianggap menjadi pilihan yang terbaik di tengah perubahan kompelksitas tantangan yang dihadapi Nahdlatul Ulama. Paling tidak ada dua alasan besar yang dapat dikemukakan. Pertama, dari sisi kesejahraan, kembali ke pelajar dianggap penting karena perubahan nama menjadi "Putra" adalah kecelakaan sejarah. Oleh kerana itu saat ini dibutuhkan organisasi yang secara intensif menjadi aktualisasi bagi pelajar NU. IPNU yang dikelahirannya memang sebagai tempat untuk mewadahi pelajar, harus dikembalikan pada posisi semula, yaitu tempat aktualisasi dan pengembangan pelajar.

Dengan adanya buku ini PP IPNU mendorong kemajuan kepemimpinan dibawahnya khususnya yang ada di sekolah sehingga segmentasi IPNU yang kembali kepadda khittohnya dapat direalisasi *digrassroots*. Dengan adanya ikhtiar ini besar harapan kami IPNU ditingkat bawah mampu mengimplementasikan sehingga terwujudnya khittah IPNU yaitu "*Back to Schools*" sebagai konsep utama pasca khittah. Maka sudah sepatutnya kita sama-sama mengawal serta menjalankan, putusan-putusan yang lahir dari khitah tersebut sebagai satu pijakan untuk mendorong organisasi IPNU masuk disendi-sendi sekolah lebih khususnya sekolah negeri

yang menjadi tumpuan besar NU pada tahun 2045. Yakinkan bahwa khidmah kita dalam menjalankan kerja-kerja organisasi menjadikan amal sholeh bagi kehidupan kita semua.

Wallahul Muaffiq Illa Aqwamithoriq
Wassalamualaikum Warah Matullahi Wabarakatuh

Jakarta, 12 Agustus 2022
PIMPINAN PUSAT
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA

ASWANDI JAILANI
Ketua Umum

KATA PENGANTAR REDAKSI

Sejak berubahnya nama IPNU dari "Putra" menjadi "Pelajar" pada Kongres ke XIV di Asrama Haji Sukolilo Surabaya pada 18 – 23 Juni 2003 hingga sekarang pergerakan keterpelajaran IPNU dirasa kurang maksimal. Dengan Jargon Back To School yang selalu didengungkan dari setiap periode ke periode mengalami sebuah proses dan progres yang beragam. Alhasil setiap forum PBNU mulai dari Munas hingga Muktamar kinerja Organisasi yang selama ini menjadi Gerbang Awal kaderisasi NU selalu dipertanyakan. Hingga akhirnya dari periode ke periode usia IPNU selalu diturunkan.

Salah satu hal yang paling krusial dipertanyakan adalah bagaimana peran IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama) dalam mengawal Pelajar yang berada di Sekolah Negeri. Oleh sebab itu langkah strategis telah dirumuskan dalam Konferensi Besar dan Rapat Kerja Nasional tahun 2019 tentang *Back To School* nya IPNU.

Akan menjadi sebuah kegagalan jikalau Buku Pedoman Komisariat sekolah ini tidak terbit. Itu adalah momok yang selalu menjadi pelecut kami dalam memberanikan diri kembali menyusun langkah strategis IPNU dalam masuk dan mengelola Komisariat Sekolah.

Sudah menjadi hal yang sangat krusial, kita harus segera memfokuskan kembali gerakan perwatan Pelajar

Sekolah, Back To School baik itu dalam naungan LP Ma'arif maupun swasta dan negeri.

Perguncingan Usia IPNU yang selalu menjadi (PR) Pimpinan Pusat dari Kongres ke Kongres hingga forum Munas NU dan Muktamar. Selalu menjadi hal yang paling menyita kita dalam menjalankan kegiatan sakral tersebut.

Oleh sebab itu Pimpinan Pusat dalam naungan Jaringan Sekolah menerbitkan Buku Pedoman Komisariat. Didalam buku ini telah kami sampaikan bagaimama cara masuk hingga mengelola komisariat. Selain itu kami sampaikan pula cara penetrasi masuk sekolah Negeri yang menjadi kendala pergerakan dalam lima tahun terakhir. Semoga selalu bermanfaat Buku Pedoman Komisariat sekolah ini.

PENYUSUN REDAKSI

ABU HASAN ASY'ARI
Ketua PP IPNU Jaringan Sekolah

DAFTAR ISI

BAGIAN SATU
PENDAHULUAN

A. Sejarah

Sejarah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) adalah sejarah yang panjang. Keberadaannya tidak lepas dari sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Karena itu, membaca sejarah IPNU tidak bisa dilepaskan dari pembacaan sejarah perjuangan pembebasan nsional, baik dalam masa penjajahan maupun masa kemerdekaan yang diwarnai pergerakan mewujudkan cita – cita nasional sampai era reformasi. Dengan kata lain dibutuhkan upaya untuk melihat IPNU sebagai bagian dari sekian organ perjuangan kaum muda yang pernah ada di Indonesia. Karena IPNU berdialektika dengan organ – organ lain, maka menarik untuk menempatkan sejarah IPNU dalam kancah pergulatan dan perjuangan kebangsaan diantara organisasi – organisasi pemuda lainnya.

Penulusuran ini menjadi esensial sebab peran kaum muda memiliki catatan penting dalam sejarah sosial dan kebangsaan negeri ini. Peran kaum muda dalam perebutan kemerdekaan, atau sebagai motor penggerak berbagai perubahan sosial pasca kemerdekaan, misalnya, terukir rapi dalam sejarah. Reformasi yang telah bergulir di tanah air sampai penentusan agendanya, tidak lepas dari kepeloporan generasi muda.

Seperti telah tercatat dalam sejarah, penjajahan di tanah air telah melahirkan gelombang pergerkan nasional yang besar. Untuk mengorganisir perlawanan terhadap penjajah, lahirlah berbagai organisasi. Kesadaran berorganisasi secara signifikan menemukan

momentumnya. Berbagai organisasi bermunculan dalam atmosfir pergerakan perlawanan ini. Sebagain besar organ – organ pergerakan itu dipelopori oleh kalangan muda, seperti Budi Utomo (20 Mei 1908), Trikoro Darmo yang akhirnya berubah menjadi Jong Java, Sarekat Islam, dan lain – lain. Keberadaan Jong Java menginspirasikan lahirnya organ serupa diluar Jawa, seperti JOng Sumatranen Bond (1917), Jong Celebes (1918), Jong Minahasa (1918), Jong Batak Bond (1925), Jong Islamieten Bond (1925). Fenomena ini kemudian ditangkap sebagai kecenderungan terhadap kebutuhan penyatuan organisasi kaum muda dalam lingkup yang lebih luas (nasional).

Kristalisasi dari pergerakan yang berbasis local diatas, terakumulasi dalam kelahiran Jong Indonesia di Bandung pada 27 Pebruari 1927 (hasil keputusan Kongres Pemuda I, 30 April 1926) dan Kongres Pemuda II pada 26 – 28 Oktober 1928 yang menghasilkan Sumpah Pemuda.

Jauh sebelumnya, pada 1916, KH. Abdul Wahab Hasbullah mendirikan madrasah Nahdlatul Wathan (Kebangkitan Tanah Air) di Surabaya. Dua tahun kemudian (1918) beliau mendirikan organisasi sosial ekonomi bernama Nahdlatul Tujjar (Kebangkitan Para Pedagang). Di Ampel Surabaya, tahun 1919, berdiri madrasah yang bernama Taswirul Afkar (Pencerahan Pemikiran). Organ – organ inilah yang nantinya menjadi embrio Nahdlatul Ulam. Diberbagai daerah diluar Jawa bermunculan organisasi pergerakan juga tidak kalah ramai seperti Sumatera Tawalib, Persis, Perti dan Persatuan Muslimin Tapanuli (PTM) yang kemudian bergabung dengan NU.

Setelah melalui pergulatan panjang, baik karena pengaruh perkembangan global, nasional, maupun local, kalangan yang berlatar belakang cultural sama itu akhirnya mendirikan Nahdlatul Ulama (NU), tepatnya pada 31 Januari 1926. NU menjadi organ konsolidator bagi pergerakan yang berserakan dibasis Islam tradisional. Makna kelahiran NU, menurut KH. H.M. Dachlan (Fillard:1999:15), berakar pada perjuangan antikolonial.

Pada tahun 1930, berbagai organ kaum muda melebur menjadi satu dengan wadah Indonesia Muda (IM), yang dipelopori Perhimpunan Pelajar – Pelajar Indonesia (PPPI). Namun dalam perjalanannya, IM melemah dan mendorong kelahiran organ lain seperti Soeloeh Pemoeda Indonesia (SPI) dan Pergerakan Pemuda Revolusioner (PERPIRI). Semenjak era ini, dunia pergerakan mengalami kevakuman. Penyebab dari kevakuman ini salah satunya adalah kebijakan represif colonial terhadap kaum muda pergerakan, seperti pembatasan hak berkumpul dan berserikat. Puncaknya ditandai dengan pengasingan pemimpin–pemimpin pergerakan, diantaranya Sukarno, Hatta dan Syahrir.

Singkat cerita, perjuangan pembebasan kolonial akhirnya mencapai titik kulminasi dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Ratusan partai politik menjamur untuk ikut dalam kontes politik. NU sebagai organisasi terbesar juga masuk gelanggang politik dengan bergabung pada partai Masyumi. Pilihan ini dilakukan sebagai bentuk perjuangan lewat salur structural. Politik NU senantiasa diwarnai dengan denamika dan tidak ada blue – print yang baku. Dialektika sejara memaksa NU keluar dari Masyumi

pada tanggal 15 April 1852. Deklarasi ini menjadi babak baru kehidupan politik NU.

Meski Indonesia telah merdeka, namun bukan berarti agenda perlawanan telah selesai. Sebab imperialisme tetap menjadi musuh besar karena berbagai agresi tetap dilancarkan. Karena itulah partai politik dan organisasi massa tetap menjadi agen penting dalam upaya pembebasan nasional, termasuk ormas pelajar dan kepemudaan.

Mengiringi menjamurnya parpol, diwilayah lain juga tumbuh berbagai organisasi sosial kaum muda dan mahasiswa. Perkumpulan Pemuda Kristen (PPKI), Gerakan Mahasiswa Islam Nasional Indonesia (GMNI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Sosialis (Germasos) berdiri. Begitu juga dilingkungan NU. Jauh sebelum itu, generasi muda NU telah memiliki kesadaran pergerakan. Kesadaran kolektif ini termanifestasikan dalam berbagai organ yang tumbuh di basis – basis NU. Bisa dicontohkan, di Surabaya telah berdiri organ pelajar Tsamrotul Mustafidin pada 11 Oktober 1936; Persatoean Santri NO (Persano) pada 1939; di Malang berdiri Persatoean Moerid NO (PAMNO) pada 1941; di Madura berdiri Ijtimauth Tholabiyyah pada 1945; di Sumbawa berdiri Ijtimauth Tholabah NO pada 1946; di Kediri berdiri Persatuan Pelajar NO (Perpeno) pada 1954; di Medan berdiri Ikatan Pelajar NO (IPENO) pada 1945; Ikatan Moerid Nahdlatul Oelama (IMNO) pada tahun 1945; Subbanul Muslimin yang berdiri di Madura, serta masih banyak lagi.

Hanya saja organ – organ tersebut belum terkonsolidir secara nasional, sehingga corak dan watak

gerakannya masih bersifat local. Yang menyatukan meraka adalah imajinasi kolektif yang dibentuk dari tradisi keagamaan Sunni yang sama. Pada titik inilah muncul kepeloporan gerakan yang hendak membangun jembatan pergerakan antar organ tersebut. Maka tampillah M. Shufyan Cholil (mahasiswa UGM), H.Musthafa (Solo), dan Abdul Ghony Farida (Semarang) yang membawa gagasan progresif ini untuk disampaikan pada Konbes PB LP. Ma'arif di Semarang pada Pebruari 1954. Gayung bersambut, sehingga gagasan ini diakomodir untuk dijadikan agenda pembahasan. Akhirnya Kombes Ma'arif Semarang tersebut mengesahkan berdirinya organisasi pelajar NU dengan nama Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), tepatnya pada tanggal 24 Pebruari 1954/20 Jumadil Akhir 1373 H.

Setelah resmi berdiri, IPNU melakukan kosolidasi melalui konferensi Segi Lima yang diselenggarakan di Solo pada 30 April – 1 Mei 1954 dengan melibatkan perwakilan dari Yogyakarta, Semarang, Solo, Jombang dan Kediri. Konferensi ini berhasil merumuskan asas organisasi, yaitu Ahlussunnah Wal Jama'ah; tujuan organisasi, yakni mengembangkan risalah Islamiyah; mendorong kualitas pendidikan; dan mengkonsolidir pelajar. Konferensi ini menetapkan M. Tholchah Mansoer sebagai Ketua Umum pertama. Hasil konsolidasi ini lalu dibawah dalam muktamar NU ke – 20 di Surabaya, (9 – 14 September 1954). Dan dalam muktamar itulah IPNU disahkan oleh PBNU sebagai satu – satunya organisasi pelajar putra dalam naungan Nahdlatul Ulama.

Langkah para pelajar putra tersebut menginspirasi para pelajar putri untuk melakukan hal yang sama, karena IPNU hanya menjadi wadah pelajar putra. Untuk itu, beberapa bulan setelah IPNU berdiri para pelajar putri yang sedang belajar di Sekolah Guru Agama (SGA) Surakarta, menganggap perlunya wadah bagi pelajar putri NU. Meraka adalah Umroh Mahfudzoh, Atika Murtadlo, Lathifah Hasyim, Romlah, dan Basyiroh Saimuri. Pertemuan itu berhasil membentuk tim kecil untuk mempersiapkan pendirian organisasi.

Mulai saat itulah, sejarah pergerakan pelajar NU telah ditorehkan. Keberadaannya mewarisi tradisi perlawanan terhadap kolonialisme, lambang kesewenang – wenangan, ketidakadilan dan dehumanisasi. Tradisi itu seperti telah terlihat dalam sejarah, telah tumbuh sejak lama. Kalaupun pada tahun 1954 baru lahir, hal itu haruslah dimaknai sebagai semata – mata formalisasi dan institusionalisasi perjuangan agar lebih terorganisir, terprogram dan terkonsolidir secara nasional.

Sejak lahirnya tahun 1988, IPNU mempunyai kepanjangan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Sesuai denagn namanya maka dalam rentang waktu tersebut pembinaan IPNU tertuju hanya pada putra putri Nu yang masih duduk di bangku sekolah. Konsentrasi keanggotaannya pun hanya terbatas di lingkungan sekolah milik NU.

Waktu terus bergulir, pemerintah Orde Baru melalui UU No. 8 tahun 1985 melakukan kebijakan "depolitisasi pelajar". Kebijakan yang mengatur organisasi kemasyarakatan itu diantaranya melarang adanya organisasi pelajar kecuali OSIS. Karena tekanan

represif pemerintah itu pada Kongres X IPNU dan Kongres IX di Pondok Pesantren Mamba'ul Maarif, Denanyar Jombang pada 2931 Januari 1988, akhirnya IPNU sepakat merubah kepanjangan "P" dari 'Pelajar' menjadi 'Putra'. Dengan demikian IPNU menjadi Ikatan Putra Nahdlatul Ulama. Hal ini dilakukan sebagai respon atas rangkaian konteks historis agar IPNU tetap survive dalam menghadapi dampak represif orde baru.

Dengan perubahan nama tersebut, maka perubahan dalam berbagai aspek tidak dapat dielakkan. Bidang garapan IPNU tidak lagi hanya terbatas pada kalangan pelajar semata, melainkan pelajar NU pada umumnya. Sejak saat itulah IPNU dihadapkan dengan target group yang sangat beragam dengan latar belakang yang beragam pula. Keragaman segmen ini bukan hanya tanpa konsekuensi. Program berat yang dihadapi IPNU kala itu adalah sulitnya menentukan pendekatan terhadap segmen kader yang bergam itu. Di samping itu, konsekuensi lain adalah tidak optimalnya menggarap kader terdidik yang dianggap sebagai tulang punggung gerakan untuk mempersiapkan generasi masa depan.

Kegelisahan itu mulai muncul pada Kongres XIII IPNU yang dilaksanakan di Makassar pada 22-26 maret 2000. Kebutuhan untuk berkonsentrasi meggarap pelajar diwujudkan dengan Deklarasi Makassar yang berisi seruan penguatan basis IPNU di sekolah dan pesantren. Setelah kongres ini IPNU melakukan gebrakan dengan mendirikan komisariat IPNU di sekolah, pesantren dan perguruan tinggi.

Meskipun sudah meneguhkan komitmennya pada gerakan kepelajaran, namun belum dianggap cukup untuk menjawab kebutuhan kembali ke pelajar secara

total. Kegelisahan ini memuncak pada Kongres XIV IPNU dan XIII di Sukolilo Surabaya. Kongres yang berlangsung pada 18-24 Juni 2003 lalu itu telah menorehkan sejarah baru bagi perjalanan badan otonom NU ini. Pada Kongres itulah setelah melalui perdebatan yang sangat panjang, tercapai kesepakatan untuk mengembalikan IPNU pada khittahnya, yaitu kembali menjadi organisasi pelajar. IPNU uang semula berkepanjangan Ikatan Putra Nahdlatul Ulama, berubah lagi menjadi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama.

Babak baru perjalanan IPNU dimulai. Keputusan mengembalikan IPNU ke pelajar dianggap menjadi pilihan yang terbaik di tengah perubahan kompelksitas tantangan yang dihadapi Nahdlatul Ulama. Paling tidak ada dua alasan besar yang dapat dikemukakan. Pertama, dari sisi kesejahraan, kembali ke pelajar dianggap penting karena perubahan nama menjadi “Putra” adalah kecelakaan sejarah. Tekanan pemerintah pada waktu itu adalah hal yang tidak dapat dilupakan sebagai faktor sebagai perubahan nama. Jelas, perubahan itu penuh dengan nuansa politis dan sekadar taktik untuk mempertahankan eksistensi ketimbang karena kebutuhan.

Kedua adalah alasan kebutuhan. Pelajar NU adalah kekuatan masa depan pada waktu-waktu lalu tidak dapat perhatian yang optimal dari Nahdlatul Ulama. Pelajar disadari sebagai komponen penting yang harus dibina dan diapresiasi, karena komponen inilah yang sejatinya menjadi asset masa depan. Akibat dari tidak adanya perhatian dan pembinaan yang khusus, tidak sedikit kalangan pemuda terdidik ini yang mengalami “kebusukan”. Oleh kerana itu saat ini

dibutuhkan organisasi yang secara intensif menjadi aktualisasi bagi pelajar dan santri NU. IPNU yang kelahirannya memang sebagai tempat untuk mewadahi pelajar dan santri, harus dikembalikan pada posisi semula, yaitu tempat aktualisasi dan pengembangan pelajar dan santri.

Dengan keputusan yang penting dan strategis ini berarti IPNU bertekad mengembalikan basis organisasinya pada sekolah dan pesantren. Jika semula IPNU memiliki wilayah garapan yang samar karena istilah "Putra" tidak memiliki identifikasi yang jelas, maka pada saat ini segmen garapan IPNU diperjelas pada segmen pelajar. Salah satu konsekuensi keputusan ini adalah IPNU harus kembali mengembangkan organisasinya di sekolah, madrasah serta unit-unit pendidikan lainnya.

B. Mandat Organisasi

Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) adalah organisasi pelajar yang berada di bawah naungan jam'iyyah Nahdlatul Ulama (NU). Dalam sisi ini, IPNU merupakan tempat berhimpun, wadah berkomunikasi, aktualisasi dan kaderisasi pelajar putra NU. Sementara di sisi lain, IPNU juga merupakan bagian integral dari generasi muda terpelajar Indonesia yang menitik beratkan bidang garapannya pada pembinaan dan pembinaan pelajar dan remaja pada umumnya.

Dengan posisi strategis itulah IPNU mengemban mandat sejarah yang tidak ringan. Di satu sisi sebagai badan otonom Nahdlatul Ulama, IPNU bertugas melakukan kaderisasi NU pada segmen pelajar, santri dan remaja. Pada saat yang sama, sebagai organisasi pelajar, IPNU juga dituntut memainkan peran sebagai

organ gerakan pelajar yang menjadi bagian tak terpisahkan dari konstelasi gerakan pelajar di tanah air.

Sebagai badan otonom NU, maka IPNU harus mengacu pada ketentuan-ketentuan organisatoris NU. Dalam pasal 10 ayat 1 Anggaran Dasar NU dinyatakan ”Untuk melaksanakan tujuan dan usaha Nahdlatul Ulama membuat perangkat organisasi yang meliputi lembaga, Lajnah dan Badan Otonom yang merupakan bagian dari kesatuan organisatoris jam’iyyah Nahdlatul Ulama”. Badan otonom adalah perngakat organisaisi Nahdlatul Ulama yang berfungsi melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perseorangan (pasal 18 ayat 1 Anggaran Rumah Tangga NU). Dalam hal ini Ikatan Palajar Nahdlatul Ulama, disingkat IPNU, adalah badan otonom yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama pada segmen pelajar lakilaki. (Pasal 18 ayat 6 poin f ART NU).

Dalam posisi dan tuntutan strategis di atas, maka IPNU merumuskan visinya, yaitu “Terbentuknya pelajar-pelajar bangsa yang bertaqwa kepada Allah SWT, berilmu, berakhlak mulia dan berwawasan kebangsaan serta bertanggung jawab atas tegak dan terlaksananya syar’at Islam menurut faham ahlussunah wal jamaah yang berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945”.

Mandat sejarah IPNU dan di atas merupakan mandat yang tidak ringan. Mandat tersebut menuntut adanya sekian konsekuensi dan prasyarat. Agar IPNU dapat memainkanperan strategis tersebut secara optimal, maka prasyarat utama yang harus dipenuhi adalah adanya kelembagaan organisasi yang kuat. Kuatnya

kelembagaan organisasi ini setidaknya diindikasikan dengan 3 (tiga) hal . Pertama, adanya sistem keorganisasian yang ideal dan diterapkan secara konsisten. Kedua, berjalannya seluruh perangkat organisasi (departemen, lembaga dan badan) sebagai motor penggerak program. Ketiga, aktif dan berkembangnya organisasi di semua tingkatan serta adanya regenerasi yang sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagai bentuk konkrit dari mandat untuk memperkuat kelembagaan dan keorganisasian, maka IPNU memandang perlu untuk mendirikan dan megembangkan organisasi di tingkatan basis melalui pembentukan komisariat di sekolah dan pesantren. Sebenarnya, keberadaan IPNU di sekolah sudah ada sejak masamasa awal berdirinya organisasi IPNU.

Dulu, di setiap sekolah dan madrasah di lingkungan NU terbentuk dan berkembang komisariat IPNU. Pada saat itu IPNU menjadi kelompok gerakan remaja yang penuh inisiatif dengan beraneka kegiatan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan remaja. IPNU adalah organisasi ekstra bagi para pelajar sebagaimana keberadaan organisasi PMII di perguruan tinggi hari ini. Oleh sebab itu **Back To School** bukan hanya wacana yang terus digembar – gemborkan melainkan aktualisasi dan realisasi adalah langkah nyata hari ini.

C. Agenda Strategis

Sebagai penerjemahan atas mandat di atas, agenda strategis yang harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan adalah kaderisasi. Kederasi merupakan”kerja peradaban” yang mutlak dilakukan

untuk menjamin keberlangsungan organisasi dalam menunaikan mandat, baik sebagai badan otonom NU maupun sebagai bagian dari gerakan pelajar di Indonesia. Dengan demikian kaderisasi menjadi platform yang harus terus dikembangkan oleh IPNU yang telah mendeklarasikan diri sebagai organisasi kader.

Berdasarkan keasadaran tersebut, sebagai ujung tombak pengkaderan NU dan bangsa, IPNU menata kelembagaan sebagai supporting system bagi proses kaderisasi yang dilakukannya. Sebagaimana dikemukakan di atas, kuatnya kelembagaan organisasi merupakan prasyarat bagi IPNU dalam menunaikan mandatnya, termasuk menunaikan agenda kaderisasi sebagai mandat strategisnya. Dengan demikian sebagai bagian penting dari penguatan kelembagaan IPNU mutlak memiliki kelembagaan yang kuat sanpai di tingkat basis.

Setelah IPNU menegaskan kembali sebagai organisasi pelajar, mutlak bagi kedua banom tersebut untuk meneguhkan basisnya di lembaga pendidikan, baik sekolah, pondok pesantren maupun masjid. Karena itulah maka pengembangan IPNU di sekolah, pondok pesantren maupun masjid harus mendapat perhatian serius. Bentuk nyata yang ingin di tawarkan adalah pendirian Pimpinan Komisariat IPNU di sekolah, pondok pesantren maupun masjid sebagai komunitas keagamaan harus pula mendapat perhatian serius karena unit sosial itu kini sangat marak sebagai wahana pertarungan ideology, terutama di daerah perkotaan.

Dengan demikian, agenda penguatan kelembagaan (institusional building) melalui pengembangan organisasi di level basis menjadi agenda

strategis yang harus mendapat perhataian secara serius dan berkelanjutan.

D. Mengapa Sekolah

Setidaknya ada tiga konsekuensi besar setelah kembalinya IPNU sebagai organisasi pelajar, yaitu mengembalikan basis IPNU ke sekolah dan pesantren, membangun gerakan berbasis talenta di kalangan muda NU, dan melakukan advokasi pelajar. ketiganya harus berjalan bersama seiring makin meningkatnya kesadaran kita akan peran yang semestinya dimainkan oleh organisasi keder ini. “Tugas” ini adalah sebuah keniscayaan sebagai tuntutan atau tepatnya kebutuhan sejarah.

Mengembalikan IPNU ke “kandang”nya (Madrasah dan Sekolah) menjadi sangat urgen untuk melakukan kaderisasi di kalangan remaja terdidik. Hal ini berangkat dari kesadaran bahwa pelajar adalah “investasi masa depan” bagi NU dan bangsa. Sementara ada kenyataan bahwa pelajar NU sebagai kekuatan masa depan kini tidak mendapat perhatian yang optimal oleh Nahdlatul Ulama, terutama dalam hal penanaman nilai dan gerakan. Oleh karena itu dubutuhkan organsasi yang secara intensif menjadi wadah aktualisasi bagi pelajar dan santri NU.

Untuk merealisasikan agenda ini, maka IPNU harus “ekspansi” ke sekolah dan pesantren. agenda ini sebenarnya sudah dimulai setidaknya lima Periode terakhir, meskipun belum menyeluruh dan terjadi hanya di sekolah Ma’arif. Agenda masuk sekolah bahkan harus direalisasikan tidak hanya pada sekolah yang bernaung di bawah LP. Ma’arif, melainkan juga sekolah non

Ma’arif yang berbasis NU maupun sekolah umum (negeri) sekalipun.

Pertanyaan penting yang harus dijawab adalah mengapa IPNU mesti masuk sekolah? Menjawab pertanyaan ini mestilah diawali dengan membaca konteks sosial dan kebijakan politik yang telah melingkupinya. Sebab, apa yang terjadi dalam republik ini telah menentukan arah dan orientasi gerakan pelajar tanah air. Selama pemerintahan Orde Baru, pelajar baik dalam pengertian siswa maupun mahasiswa ditempatkan sebagai obyek pendidikan semata. Mestinya pendidikan diarahkan untuk melakukan pembebasan dan pencerahan, tetapi yang dilakukan Orde Baru adalah pengebirian dan bahkan pembodohan. Karenanya pendidikan yang diberikan tidak menciptakan ruang kesadaran kritis, melainkan menjadikan peserta didik teralienasi dari lingkungan sosialnya.

Di Perguruan Tinggi, penerapan NKK/BKK merupakan bukti nyata bahwa penguasa ingin melakukan penguasaan terhadap mahasiswa yang merupakan elemen utama penggerak gerakan dan aksi sosial. Aksi sosial yang dimaksud berupa kritikdan tuntutan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah yang tidak memihak rakyat. Dengan ‘menormalkan’ kehidupan kampus, penguasa berharap mahasiswa tidak lagi vocal dan hanya diasyikan dengan kegiatan perkuliahan yang ketat oleh sistem SKS.

Hal yang sama dialami oleh siswa – siswa sekolah (yang belakangan diidentikan dengan istilah pelajar). Para pelajar Putih abu – abu dan putih biru ini benar – benar dijauhkan dari realitas sosial. Setumpukan buku – buku ajar yang harus dihafalkan agar dalam ujian

mendapatkan angka yang tinggi, telah menyebabkan pelajar terlalu larut dalam ‘dunia lain’ bernama sekolah. Dikatan “dunia lain” karena sekolah tak jarang mengajarkan banyak hal yang sama sekali beda dengan kehidupan nyata.

Sebagai contoh, diruangan kelas sering kali diajarkan tentang geografi Indonesia yang begitu elok dari Sabang sampai Merauke. Sumber daya alam yang bisa diperbaharui dan tidak diperbaharui merupakan aset negara takterkira yang menurut teorinya dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Namun kenyataannya, hutan di Kalimantan dibabat habis dan emas di Papua dieksploitasi sedemikian rupa. Tentang kemana hasil pemanfaatan alam Indonesia itu mengalir, pelajar tak pernah diberitahu.

Berbeda dengan mahasiswa dikampus yang terus melakukan perlawanan sehingga upaya kooptasi terhadap gerakan mahasiswa sedikit banyak tidak membuahkan hasil, disekolah perlawanan serupa tidak terjadi. Maka penetrasi penguasa semakin menghujam dikalangan pelajar. Kalau mahasiswa terus mampu bergerak dan mencari “sela sempit” untuk terus menyuarakan kepentingan rakyat, maka siswa semakin dininabobokkan dengan pelajaran – pelajarannya.

Salah satu “mudus”nya adalah kebijakan regulative tentang organisasi intra sekolah, yaitu OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah). Kita Semua tahu bahwa keberadaan OSIS adalah “peninggalan” masa lalu. Ia adalah bagian tak terpisahkan dari penyeragaman yang dilakukan oleh rezim Orde Baru untuk melakukan hegemoni. Oleh pemerintah OSIS ditetapkan sebagai satu – satunya organisasi intra sekolah. Kebijakan ini

adalah bentuk pengkebirian aktivitas siswa oleh pemerintah. Jika dicermati kebijakan ini adalah bentuk penyekatan gerakan pelajar agar bersifat terbatas dan tidak terorganisir secara nasional. Ketentuan bahwa OSIS yang dinisbatkan sebagai organisasi wajib dan satu – satunya organisasi intra sekolah bagaimanapun mempengaruhi ruang gerak pelajar. Kontrol dan indokrinitas akan lebih mudah dilakukan ketika semua pelajar diharuskan masuk OSIS. OSIS berubah menjadi "lorong gelap" yang mengarahkan siswa kepada penjara ketertundukan.
Masuknya IPNU ke sekolah adalah upaya untuk memperbaiki sejarah dengan "perlawanan" terhadap warisan kebijakan lama itu.

Kita sadar betul bahwa sudah saatnya pelajar diberi ruang yang luas untuk beraktualisasi dan melakukan pengembangan potensi. Bahkan masuknya IPNU ke dunia pelajar memberi kesempatan bagi pelajar untuk bergaul secara nasional. Tentu hal ini dengan maksud untuk menyediakan ruang kebebasan dan kompetisi bagi pelajar untuk beraktivitas dan belajar membaca realitas secara luas.

Sekolah diharapkan menjadi ajang udara gagasan multiarah dari para pelajarnya. Tidak kalah pentingnya kesadaran yang diciptakan didalamnya membentuk pelajar untuk memahami realitas kebangsaan Indonesia yang plural dan multicultural. Karena iklimya dialogis dan bukan monologis merupakan hal yang tidak bisa ditawar. Penyeragaman dengan kontrol ketat sudah saatnya diakhiri. Pelajar dicarikan kesempatan untuk mengekspresikan segala macam kreatifitas positif yang melatih pendewasaan mental dan pola pikir.

Membebani sekolah dengan focus membebaskan pelajar dari kungkungan sistem pendidikan yang kurang manusiawi merupakan “medan perang” organisasi pelajar. Pijakannya, pendidikan seharusnya tidak melulu disekolah yang beberapa jam, mulai pagi hingga siang, atau sampai sore yang ditambah dengan tambahan pelajaran (les) menjelang ujian. Islam mengajarkan pendidikan tak pernah henti seumur hidup, minal mahdi ilalladi (mulai kelahiran hingga kematian). Jadi, pendidikan tidak semata saat berada di sekolah. Saat berada di luar sekolah, masyarakatlah yang mengambil alih tanggung jawab itu. Dalam konteks ini keberadaan organisasi, terutama organisasi pelajar semacam IPNU menempati posisi penting dan strategis.

Interalisasi nilai nilai dan dasar dasar moral yang bersifat afektif menjadi penting untuk mendidik generasi yang tidak sekedar dapat menghafal tapi mempunyai sikap dan perilaku yang sesuai dengan potret manusia Indonesia dengan budi dan budayanya yang khas. Nilainilai moralitas harus diberikan kepada pelajar, agar dalam mengambil tindakan mereka mempunyai kendali nilai yang bekerja secara *self control*.

IPNU di sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang paling pas untuk mengambil peran itu. Belajar dari organisasi ekstra kampus yang telah dengan cepat melakukan akselerasi pengkaderan di tingkat mahasiswa, organisasi pelajar seharusnya dapat melakukan hal yang sama atau bahkan lebih. Untuk merealisasikan itu semua IPNU yang telah menegaskan diri sebagai organisasi pelajar, memegang konsistensi sikap dan harapan yang focus, terarah dan terukur.

Menyadari realitas kesejarahan tersebut, maka sebagai badan otonom yang bertugas melakukan kaderisasi, IPNU berkewajiban memperkuat dan mendukung peran pesantren dalam melakukan kaderisasi ulama penerus Nahdlatul Ulama. Hal ini menjadi penting karena santri merupakan kader ideologis, intelektual dan organisatoris NU. Masuknya IPNU secara kelembagaan dalam pesantren dimaksudkan menjadi kepanjangan NU untuk melakukan kaderisasi, agar santri tidak saja kuat secara keilmuan dan tradisional, melainkan siap menjadi kader NU yang ideologis, militan, memiliki kapasitas dan "siap tempur" dalam mengembangkan NU dalam masyarakat. Langkah ini disamping sebagai pengenjawantahan dari komitmen IPNU "Back To School", juga merupakan ikhtiar nyata untuk menguatkan kaderisasi dilevel basis.

E. Tentang Buku Pedoman

Dengan latar pemikiran di atas, sudah saatnya IPNU melakukan aksi nyata dengan membentuk dan mengembangkan komisariat IPNU di sekolah dan madrasah. Untuk melakukan itu, diperlukan mekanisme, tahapan dan prosedur teknis. Buku ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis bagi pengurus IPNU serta *stakeholdernya* dalam mendirikan dan mengembangkan komisariat IPNU.

Penerbitan buku ini merupak out put dari Konferensi Besar dan Rapat Kerja Nasional PP IPNU tahun 2019 di Lampung dan tindak lanjut dari penandatanganan Memory of Understanding (MoU) antara PP IPNU dengan PP LP Ma'arif NU tentang komisariat di sekolah dalam naungan Lembaga Pendidikan Ma'arif.

Penerbitan ini dimaksudkan untuk menyediakan pedoman teknis dan prosedur operasional bagi pengurus IPNU serta *stakeholder*-nya dalam mendirikan dan mengembangkan komisariat IPNU di sekolah dan madrasah. Hal ini dipandang penting mengingat berdasarkan hasil evaluasi, pendirian komisariat menemui kendala yang cukup serius baik pada level teknis operasional maupun mekanisme kelembagaan.

Pedoman teknis ini berisi rumusan konsep, strategi pendirian dan pengembangan, serta prosedur teknis yang harus ditempuh dalam tahapan pendirian komisariat. Pedoman ini hanya dibatasi hanya pada pedoman bagi pendirian Pimpinan Komisariat IPNU di sekolah, madrasah yang bernaung di bawah LP. Ma'arif NU. Buku juklak ini terdiri dari lima bab.

1. Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini memaparkan sejarah pendirian dan pengembangan komisariat IPNU. kemudian mandat organisasi, agenda strategis, mengapa membidik sekolah dan isi tentang juklak ini.
2. Bab kedua dalam buku ini membahas tentang Konsep Dasar Pendirian IPNU di sekolah dan madrasah. Bab ini terdiri dari tiga sub bab, yaitu tentang IPNU, dan pelajar, konsep dasar komisariat dan relasi kimitraan dan mekanisme kelembagaan.
3. Bab ketiga dalam Pedoman ini memaparkan tentang komisariat sekolah. Pemaparan komisariat sekolah meliputi beberapa hal, yaitu apa komisariat sekola itu, mengapa perlu komisariat sekolah itu, lankahlangkah pembentukan komisariat, persiapan yang mencakup pembangunan relasi dengan beberapa lembaga terkait dan peran masingmasing

lembaga tersebut, dan memetakan sekolah di wilayah kerja. Bab ini juga membahas tentang pembentukan komisariat sekolah yang mencakup tiga model sekolah, yaitu sekolah di bawah koordinasi LP. Ma’arif NU, sekolah NU di luar koordinasi LP. Ma’arif NU dan sekolah umum. Terakhir, bab ini memaparkan tentang penguatan kelembagaan yang meliputi legalisasi lembaga, aktifasi, mentoring dan monitoring.

4. Bab Empat MAKESTA Unggulan (Penetrasi Sekolah Negeri) Program gagasan PP IPNU dalam upaya penyampaian nilai Islam Rahmatan Lil Alamin dan beberapa pendekatan untuk mengajak Pelajar dari kalangan Sekolah Negeri Favorit.
5. Bab Lima dalam buku ini merupakan bab terakhir.Bab ini berisi penutup.

BAGIAN DUA
KONSEP DASAR PENDIRIAN IPNU DI SEKOLAH

A. IPNU dan Pelajar

Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) merupakan organisasi yang sejak kelahirannya bertugas menggarap pelajar. Pelajar, bagi IPNU merupakan investasi masa depan yang harus dikelola dengan cermat dan tepat. Namun Pertanyaannya, siapa yang disebut pelajar? Istilah pelajar belum disepakati secara baku. Dulu, pelajar bermakna luas sebagai orang yang sedang mengikuti proses pembelajaran (dimanapun). Namun belakangan terjadi penyempitan makna, dimana pelajar hanya ditempelkan sebagai predikat bagi orang yang sedang menjalani sekolah formal (SD, SLTP, SLTA).

Demikian pula dalam nomenklatur IPNU, istilah pelajar juga mengalami perkembangan seiring kesejahraan organisasi ini. Pada awal masa berdirinya IPNU dan , pelajar adalah orangorang yang tengah menempuh pendidikan, yaitu siswa, siswa dan mahasiswa. Pengertian ini sejalan dengan obsesi para founder IPNU untuk menyatukan langkah pelajar formal (siswa dan mahasiswa). Namun, sejak tahun 1988, di masa IPNU di “wilayah remangremang”, seiring perubahan nama IPNU menjadi organisasi putra dan putri, maka istilah pelajar juga meluas. Remaja usia pelajar akhirnya dikategorikan sebagai pelajar.

Kini, setelah IPNU kembali menjadi organisasi pelajar, istilah pelajar juga diupayakan dipersempit. IPNU tengah berupaya menfokuskan diri pada pelajar yang sebenarnya, yaitu siswa, santri (dan mahasiswa).

Yang disebut terakhir, hingga kini masih debatable, mengingat secara formal sudah ada organisasi yang sudah yang mewadahi, yaitu PMII. Sebagai salah satu komitmen pada percepatan kaderisasi, pembatasan yang mungkin adalah menggunakan variable umur. Umur anggota IPNU adalah antara umur 13-25 tahun. Pembatasan umur ini dimaksudkan untuk mempertegas segmentasi.

Terlepas dari perdebatan siapa yang disebut pelajar, tiga elemen generasi terdidik itu menjadi garapan IPNU dalam melakukan kaderisasi. Eksistensi IPNU sebagai organisasi pelajar, meniscayakan organisasi menjadikan pelajar sebagai basis garapannya. Dalam kerangka ini, sebagai sarana pengembangan kaderisasi pada level lembaga pendidikan, IPNU mengembangkan konsep komisariat, sebagai satuan organisasi yang berada di lembaga pendidikan.

B. Konsep Dasar Komisariat

Pengembangan IPNU dilembaga pendidikan merupakan salah satu wujud pengembangan organisasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Kongres XV. Karena segmen IPNU adalah pelajar, maka pengembangan organisasi dilembaga pendidikan merupakan upaya untuk menguatkan basis kadernya. Dalam struktur IPNU terdapat dua satuan tingkatan organisasi terendah, yaitu ranting dan komisariat. Ranting adalah satuan tingkatan organisasi yang berkedudukan di desa / kelurahan atau permukiman. Sedangkan komisariat merupakan satuan tingkat organisasi yang berkedudukan dilembaga pendidikan. Kepengurusan dilevel komisariat disebut Pimpinan Komisariat.

Kedudukan dan keberadaan Pimpinan Komisariat IPNU diatur dalam Peraturan Rumah Tangga (PRT) pasal 14, yang berbunyi :

1. Pimpinan Komisariat berkedudukan dilembaga pendidikan yang merupakan pimpinan tertinggi IPNU ditingkat lembaga pendidikan.
2. Pimpinan Komisariat memimpin dan mengkoordinir anggota didaerah kewenangannya, serta melaksanakan kebijakan Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Cabang untuk daerahnya.
3. Dalam satu lembaga pendidikan yang telah mempunyai sedikitnya 10 (sepuluh) anggota dapat mendirikan Pimpinan Komisariat, untuk selanjutnya tidak diperbolehkan mendirikan Pimpinan Komisariat yang lain.
4. Pimpinan Komisariat bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.

Sementara itu Pimpinan Komisariat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) pasal 15 ayat (1) yang berbunyi : " Pimpinan Komisariat berkedudukan dilembaga pendidikan / pondok pesantren / perguruan tinggi, yang merupakan pimpinan tertinggi ditingkat lembaga pendidikan / pondok pesantren / perguruan tinggi ". Istilah lembaga pendidikan dalam klausul peraturan diatas adalah lembaga pendidikan baik formal maupun non formal, yaitu sekolah, madrasah, pondok pesantren, perguruan tinggi, madrasah diniyah dan lembaga – lembaga pendidikan lainnya. Dengan demikian komisariat dapat diartikan sebagai satuan tingkatan organisasi IPNU yang berkedudukan disekolah, madrasah dan perguruan tinggi, atau bentuk lembaga pendidikan lainnya. Sedangkan Pimpinan

Komisariat (selanjutnya disingkat PK) merupakan satu kesatuan organik yang memiliki kedudukan ditingkat sekolah, madrasah, perguruan tinggi, atau lembaga pendidikan lainnya.
Jika hendak dirinci, lembaga pendidikan yang menjadi basis sosial IPNU dapat digambarkan dalam skema berkut :

Skema 1 :

Lembaga Pendidikan Basis IPNU

Dengan melihat skema diatas, tampak bahwa lembaga pendidikan yang menjadi basis sosial IPNU demikian variatif. Karenanya pendekatan dan posisi kelembagaan yang ditawarkan juga harus berbeda. Buku petunjuk pelaksanaan ini dimaksudkan untuk menyediakan pedoman teknis dalam pembentukan dan pengembangan IPNU khusus dipesantren dan sekolah / madrasah yang bernaung dibawah lembaga pendidikan Ma'arif. Sebagai unit kelembagaan dilevel paling bawah, keberadaan komisariat IPNU merupakan suatu yang sangat vital sebab langsung bersentuhan dengan basis kader.

Dalam struktur IPNU, Pimpinan Komisariat berada dibawah koordinasi Pimpinan Anak Cabang (PAC). Secara menyeluruh jika dilihat dalam skema struktur organisasi, posisi PK dapat dilihat dalam skema berikut :

Skema 2 :

Posisi Pimpinan Komisariat Dalam Struktur IPNU

Berdasarkan struktur tersebut maka, Pimpinan Komisariat berfungsi untuk melaksanakan kebijakan organisasi dalam lembaga pendidikan yang bersangkutan. Hal ini digariskan secara lengkap

dalam Peraturan Organisasi IPNU pasal 88 sebagai berikut :

a. Pimpinan Komisariat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (disingkat PK IPNU) merupakan suatu kesatuan organik yang memiliki kedudukan sebagai pemegang kepemimpinan organisasi ditingkat sekolah, pesantren, perguruan tinggi, atau lembaga pendidikan lainnya.
b. PK berkedudukan dilembaga pendidikan yang bersangkutan.
c. Daerah kerja PK meliputi seluruh wilayah dalam lembaga pendidikan yang bersangkutan.

Sedangkan mengaturnya dalam Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi pasal 116 sebagai berikut :

a. Pimpinan Komisariat Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama disingkat PK (selanjutnya cukup disebut PK).
b. Berkedudukan disekolah, pondok pesantren atau lembaga pendidikan.
c. Daerah kerja PK meliputi sekolah dan madrasah.

   Sekolah atau madrasah dalam hal ini terdiri dari dua tingkat, yaitu tingkat SLTP dan SLTA. Tingkat SMP meliputi SMP dan MTs atau yang sederajat. Sedangkan tingkat SLTA terdiri SMA, SMK, MA atau yang sederajat. Dalam semua lembaga pendidikan formal tersebut dapat didirikan Pimpinan Komisariat IPNU.

Posisi PK IPNU dilembaga pendidikan sekolah meliputi dua bentuk, yaitu :

a. Masuk ke dalam struktur sekolah sebagai organisasi intra. Dalam hal ini, PK IPNU menggantikan posisi dan fungsi organisasi intra sekolah, yaitu OSIS.
b. Masuk ke dalam struktur sekolah sebagai organisasi ekstra.
   Dengan melihat struktur diatas, maka PK menempati posisi yang sangat strategis dan vital. Dikatakan vital karena ia bersentuhan langsung dengan anggota dan dengan demikian menjadi ujung tombak organisasi secara nasional. Dikatakan strategis karena keberadaannya dilembaga pendidikan memungkinkan PK IPNU mengorganisir sumber daya manusia terdidik yang akan menjadi generasi mendatang.
c. Mengingat kedudukan dan fungsi Pimpinan Komisariat yang sedemikian strategis tersebut, maka pembentukan dan pengembangan komisariat IPNU merupakan hal yang sangat urgen. Karenanya agenda ini harus menjadi kerja semua pihak dan lembaga yang terlibat dalam pengembangan sumber daya manusia NU.

C. Relasi Kemitraan dan Mekanisme Kelembagaan

Demikian juga disekolah dan madrasah. Dalam kaitan ini IPNU harus melibatkan Lembaga Pendidikan Ma’arif NU sebagai lembaga dibawah NU yang bertugas melaksanakan kebijakan NU dibidang pendidikan dan pengajaran formal. Sebagaimana diketahui, LP. Ma’arif NU membawahi sekolah dan madrasah. Mengingat IPNU menjadi organisasi pelajar disekolah dan

madrasah, maka pengembangan komisariat juga menjadi tugas LP. Ma'arif NU. Berdasarkan kesadaran ini maka kemitraan diantara lembaga – lembaga tersebut menjadi sangat penting dan menentukan.

Agar pelaksanaan program pengembangan organisasi ini berjalan optimal, mutlak dibutuhkan jalinan kemitraan yang kuat dan berkelanjutan disemua level. Masing – masing institusi menjalankan tugasnya masing – masing menurut kewenangan yang bersangkutan. Dalam konteks ini Nahdlatul Ulama disetiap tingkatan menjadi koordinator dan fasilitator bagi bertemunya lembaga – lembaga tersebut. Sesungguhnya kerja pengembangan organisasi ini merupakan kerja bersama lembaga – lembaga terkait. Untuk pembentukan dan pengembangan komisariat IPNU di pesantren, mekanisme kelembagaanya dapat dilihat dalam skema berikut :

Skema 3 :

Relasi Kemitraan dan Mekanisme Kelembagaan Dalam Pembentukan dan Pengembangan PK IPNU Disekolah/Madrasah Dalam melaksanakan kerja pembentukan dan pengembangan PK IPNU disekolah, IPNU disetiap tingkatan membangun kemitraan dan bekerjasama dengan LP. Ma'arif NU ditingkatan yang bersangkutan. Khusus PAC IPNU melakukan jalinan kemitraan dan bekerjasama dengan MWC LP. Ma'arif NU dan sekolah atau madrasah yang akan didirikan komisariat. Mekanisme detailnya dapat dilihat dalam Bab IV.

Lalu bagaimana pembagian tugas dalam setiap level? Pada dasarnya kerja pengembangan ini merupakan kerja semua pimpinan dalam semua tingkatan. Setiap

tingkatan mempunyai tugas dan kewajiban sesuai dengan levelnya. Pembagian tugas tersebut dapat dilihat dalam table berikut :

Tabel1
Relasi Kemitraan dan Mekanisme Kelembagaan
Dalam Pembentukan dan Pengembangan PK
IPNU Disekolah/Madrasah

PP IPNU	a. Menyediakan basis legal b. Merumuskan dan menerbitkan panduan/junik c. Melakukan Pemetaan organisasi secara nasional d. Melakukan sosialisasi kepada tingkatan dibawahnya e. Melakukan monitoring f. Menyampaikan progress report kepada PBNU
PW IPNU	a. Membangun kesepahaman antar – orga b. Merumuskan langkah dan stretegi secara regional c. Melakukan sosialisasi kepada tingkatan dibawahnya d. Membuat pilot project e. Melakukan monitoring f. Menyampaikan progress report kepada PWNU dan tingkat diatasnya
PC IPNU	a. Membangun kesepahaman antar – organ b. Merumuskan langkah – langkah operasional dilevel lokal c. Melakukan sosialisasi kepada tingkatan dibawahnya

	d. Membuat pilot project e. Melakukan monitoring f. Menyampaikan progress report kepada PCNU dan tingkat diatasnya
PAC IPNU	a. Membangun kesepahaman antar – organ b. Melakukan langkah – langkah operasional pendirian PK sesuai tahap dan strategi yang telah ditentukan c. Melakukan monitoring d. Menyampaikan progress report kepada MWCNU dan tingkat diatasnya e. Memfasilitasi pendirian PK dan pelaksanaan program PK f. Melakukan monitoring g. Menyampaikan progress report kepada MWCNU dan tingkat diatasnya

Kemitraan ini dilakukan secara berkelanjutan dan berjangka panjang, mulai dari pembangunan kesepahaman, perumusan konsep dan strategi, perencanaan teknis, pelaksanaan tahapan pembentukan dan pengembangan, sampai evaluasi dan monitoring. Demi optimalisasi kerja pengembangan organisasi ini, maka peran serta semua lembaga yang terlibat menjadi sangat penting. Peran dan pembagian tugas tersebut akan diterjemahkan lebih lanjut dalam bab selanjutnya.

BAGIAN TIGA
KOMISARIAT SEKOLAH

A. Pengertian Komisariat Sekolah

Komisariat sekolah merupakan pimpinan IPNU dilembaga pendidikan SLTP / sederajat dan SLTA / sederajat yang berfungsi untuk mengembangkan kualitas SDM para pelajar yang berlandaskan Ahlussunnah Wal Jamaah.

B. Mengapa Perlu Komisariat Sekolah

1. Sekolah merupakan basis pelajar yang adalah segmentasi garap IPNU
2. Sekolah merupakan basis pembentukan ideologi
3. Pelajar sekolah adalah generasi muda yang berada dalam masa pancaroba atau pencarian jati diri
4. Pelajar sekolah adalah generasi muda yang menjadi sesaran perebutan ideolog

C. Langkah – Langkah Pembentukan Komisariat

Dalam membentuk komisariat sekolah, diperlukan beberapa langkah. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan berbagai aktifitas sebagai persiapan pembentukan komisariat. Langkah selanjutnya yang diperlukan adalah pemetaan jumlah sekolah yang ada diwilayah kerjanya masing – masing.

1. Tahap persiapan

   Persiapan yang harus dilakukan dalam pembentukan komisariat sekolah adalah membangun kesepakatan dan kesepahaman dengan beberapa pihak terkait. Berkaitan dengan hal ini, PC IPNU harus membangun kesepahaman dan kesepakatan dengan banom – banom serta lembaga – lembaga terkait, yaitu PCNU, PC LP. Ma’arif dan

kepala sekolah atau pemegang kebijakan sekolah. Termasuk dalam hal ini, PC IPNU juga melakukan koordinasi dengan PAC IPNU. Pembangunan relasi tersebut sangat penting dan diperlukan sebagai mediator dan fasilitator dalam proses pembentukan komisariat sekolah.

a. Nahdlatul Ulama

Dalam mempersiapkan pembentukan komisariat sekolah, PC IPNU harus melakukan silaturrahim kepada ketua PCNU setempat. Silaturrahim tersebut dilaksanakan untuk menjelaskan program IPNU untuk mendirikan komisariat sekolah didaerah setemoat. Output yang diharapkan dari silaturrahim ini adalah adanya MoU antara PCNU dengan PC IPNU tentang pembentukan komisariat sekolah didaerah setempat. Selain itu, PC IPNU juga mengharapkan bantuan dan peran serta PCNU untuk menjadi mediator dan fasilitator antara PC IPNU dengan pihak terkait. Untuk lebih mudahnya, peran dari PCNU yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1) PCNU (dalam relasinya dengan NU ditingkatan anak cabang)
   - PCNU melakukan koordinasi dengan pengurus NU tingkat anak cabang dan mensosialisasikan MoU antara PCNU dengan PC IPNU
   - PCNU juga diharapkan agar meminta keterlibatan NU ditingakat anak cabang untuk menjadi mediator dan fasilitator baik yang bersifat kebijakan maupun

teknis dalam proses pembentukan komisariat sekolah

2) PCNU (dalam relasinya dengan LP. Ma'arif NU tingkat cabang)
   - PCNU mensosialisasikan MoU antara PCNU dengan PC IPNU tentang pembentukan komisariat
   - PCNU meminta dan memerintahkan kepada LP. Ma'arif NU ditingkat Cabang mensosialisasikan kepada LP. Ma'arif ditingkat anak cabang dan kepala sekolah terkait.
   - PCNU juga meminta dan memerintahkan agar LP. Ma'arif NU ditingkat Cabang dapat menjadi mediator dan fasilitator dalam pembentukan komisariat sekolah.
3) PCNU (dalam relasinya dengan kepala sekolah / pemegang kebijakan sekolah disekolah luar koordinasi LP. Ma'arif NU)
   - PCNU mensosialisasikan IPNU secara organisatoris meliputi visi, misi dan program kerja kepada para kepala sekolah atau pemegang kebijakan sekolah disekolah diluar LP. Ma'arif NU
   - PCNU juga meminta agar mereka dapat mensosialisasikan informasi yang sama kepada seluruh pemegang kebijakan disekolahnya, meliputi struktur disekolah dan guru – guru serta siswa yang diwakili oleh pengurus organisasi siswa serta dapat menjadi fasilitator

dalam pendirian komisariat sekolah IPNU.

b. LP. Ma'arif

Dalam pembentukan komisariat sekolah, PC IPNU juga perlu membangun kesepakatan dan kesepahaman dengan LP. Ma'arif ditingkat Cabang. Pembangunan kesepakatan dan kesepahaman dengan LP. Ma'arif ini dapat dimulai dengan silaturrahim. Dalam silaturrahim tersebut, PC IPNU menjelaskan tentang program pendirian komisariat disekolah. Dalam realisasi ini, output yang juga diharapkan adalah adanya kesepakatan atau MoU tentang pembentukan komisariat sekolah IPNU didaerah setempat. Selain itu, LP. Ma'arif ditingkat Cabang, diharapkan dapat berperan serta dalam pembentukan komisariat sekolah dalam hal :

1) LP. Ma'arif Cabang (dalam realisasinya dengan LP. Ma'arif di tingkat Cabang)
   - ➢ LP. Ma'arif ditingkat Cabang mensosialisasikan MoU dengan PC IPNU tentang pembentukan komisariat sekolah kepada LP. Ma'arif ditingkat Anak Cabang.
   - ➢ LP. Ma'arif ditingkat Cabang meminta dan memerintahkan kepada LP. Ma'arif ditingkat Anak Cabang untuk mensosialisasikannya kepada kepala sekolah terkait serta dapat menjadi mediator dan fasilitator dalam proses pembentukan komisariat sekolah IPNU.

c. Kepala Sekolah atau Pemegang Kebijakan Disekolah

Selain NU dan LP. Ma'arif, PC IPNU juga melakukan silaturrahim kepada kepala sekolah atau pemegang kebijakan disekolah. Hal ini dapat dilakukan oleh PC IPNU untuk sekolah diluar LP. Ma'arif yang sudah terbangun kuat pendekatannya. Dalam silaturrahim tersebut, PC IPNU mensosialisasikan program pendirian komisariat IPNU ditingkat sekolah. Selanjutnya, PC IPNU dapat meminta komitmen mereka untuk membantu pembentukan komisariat IPNU disekolahnya. Untuk tujuan tersebut, kepala sekolah atau pemegang kebijakan disekolah tersebut diharapkan dapat membantu IPNU dengan melakukan beberapa hal, yaitu :

1) Mensosialisasikan IPNU secara organisatoris meliputi visi, misi dan program kerja kepada para pemegang kebijakan terkait disekolahnya seperti Waka Kesiswaan, guru dan siswa.
2) Menjadi mediator dan fasilitator dalam proses pendirian komisariat sekolah IPNU.

d. PAC IPNU dan PAC

PC IPNU juga harus melakukan koordinasi dengan PAC IPNU terkait dengan pendirian komisariat sekolah. Hal ini penting dilakukan mengingat adanya keberadaan sekolah terutama setingkat SLTP sederajat yang berada diwilayah PAC. Dalam koordinasi tersebut, PAC IPNU diharapkan dapat melaksanakan proses

pembentukan komisariat sekolah dengan melakukan beberapa hal, yaitu :

Membangun relasi dengan beberapa pihak terkait, yaitu NU ditingkat MWC, LP. Ma'arif ditingkat Anak Cabang, dan kepala sekolah atau pemegang kebijakan sekolah disekolah diluar LP. Ma'arif Mendirikan komisariat sekolah IPNU

2. Memetakan sekolah diwilayah kerja

   Langkah selanjutnya yang harus dilakukan dalam rangka mempersiapkan pembentukan komisariat sekolah IPNU adalah melakukan pemeteaan tentang keberadaan sekolah yang ada didaerah setempat. Pemetaan untuk sekolah setingkat SLTA dilakukan oleh PC IPNU, sementara pemetaan untuk sekolah setingkat SLTP dilaksanakan oleh PAC IPNU. Pemetaan keberadaan sekolah ini meliputi beberapa hal, yaitu :

   a) Jumlah sekolah

      Pemetaan tentang jumlah sekolah ini meliputi beberapa informasi, yaitu :

      - Jumlah sekolah NU yang berada dibawah koordinasi LP. Ma'arif
      - Jumlah sekolah NU yang berada diluar koordinasi LP. Ma'arif
      - Jumlah sekolah Islam bukan NU
      - Jumlah sekolah umum
      - Jumlah sekolah milik non Islam

   b) Jumlah siswa

      Untuk sekolah umum dan sekolah milik non Islam perlu didapat data tentang jumlah siswa yang beragama Islam.

c) Jumlah guru

Untuk sekolah umum dan sekolah milik non Islam perlu adanya data tentang jumlah guru yang beragama Islam. Untuk memudahkan pemetaan sekolah ini, PC IPNU serta PAC IPNU dapat mengacu dan mengisi check list pemetaan sekolah sebagai berikut :

Tabel 1.
Check List Pemetaan Sekolah
Daerah ....

No	Nama Sekolah	Jenis Sekolah	Jumlah siswa	Jumlah Guru	Berada dibawah koordinasi L.P.Maarif NU	Berada diluar koordinasi L.P.Maarif NU	Islam Non NU	Umum	Non Islam
1									
2									
3									
4									
5									

d) Key person

Setelah melakukan pendataan mengenai jumlah sekolah yang ada, PC IPNU serta PAC IPNU setempat harus melakukan pemetaan tentang keberadaay key person yang ada dimasing – masing sekolah tersebut. Key person

yang dimaksudkan dalam hal ini adalah orang yang menjadi penghubung atau pintu masuk IPNU setempat untuk bisa memasuki sekolah tersebut.

Seyogyanya, key person ini adalah tokoh sekolah yang merupakan pemegang kebijakan atau berpengaruh dalam menentukan kebijakan sekolah. Namun, key person ini juga dapat berupa guru, siswa atau lainnnya yang dapat menghubungkan dengan tokoh sekolah atau pemegang kebijakan yang dimaksud. Dalam paraktiknya, posisi atau keberadaan key person dimasing – masing jenis sekolah akan menemui perbedaan. Untuk sekolah yang berada dibawah naungan LP. Maarif NU, key person dapat berupa institusi sekolah yang dalam hal ini adalah kepala sekolah. Namun untuk sekolah lainnya terutama sekolah umum, key person dapat berupa personel seperti guru atau murid.

Untuk memudahkan pelaksanaan pendataan dan pemetaan tentang keberadaan key person ini, PC dan PAC IPNU dapat mengacu dan mengisi check list sebagai berikut:

Tabel 2.
Check List Key Person
Daerah …………..

No	Nama Sekolah	Alamat	Jenis Sekolah	Jml	Posisi		Islam Non NU	Umum	Non Islam	Kepsek/ Pengurus Guru Murid	Lain – Lain
					Berada dibawah L.P.Maarif NU	Berada diluar L.P.Maarif NU					
1											
2											
3											
4											

3. Pra pembentukan komisariat

Langkah selanjutnya yang harus dilaksanakan dalam proses pembentukan komisariat sekolah adalah melaksanakan kegiatan pra pembentukan

komisariat. Kegiatan pra pembentukan ini dimaksudkan untuk mengenalkan IPNU secara organisasi. Proses pengenalan awal ini dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk kegiatan tergantung kondisi sekolah dan kebaradaan key person sebagaimana yang ada dalam pemetaan. Langkah dan kegiatan yang dimaksudkan dalam pra pembentukan komisariat ini meliputi beberapa hal sebagai berikut :

1) Mengumpulkan siswa sebanyak 10 orang untuk membentuk komisariat IPNU dan 15 orang untuk membentuk komisariat sebagaimana diatur dalam PD/PRT masing – masing organisasi.
2) Mengadakan kegiatan pengenalan awal organisasi IPNU. Kegiatan pengenalan awal ini dapat berupa kegiatan yang berbeda antar sekolah. Perbedaan tersebut tergantung pada jenis sekolah, kondisi sekolah, dan key person yang ada. Untuk sekolah yang berada dalam organisasi Maarif atau sekolah NU yang keberadaan key personnya kuat, pengenalan awal organisasi ini dapat dilaksanakan dalambentuk Masa Orientasi Pelajar (MOP). Pelaksanaan MOP ini dilaksanakan sesuai dengan juklak pengkaderan yang ada dimasing – masing organisasi. Untuk sekolah umum atau sekolah yang keberadaan key personnya tidak terlalu kuat, maka kegiatan pengenalan awal organisasi ini dapat dilaksanakan melalui aktifitas seperti pembentukan study club dan lain sebagainya.

4. Pembentukan komisariat sekolah

Dalam pembentukan komisariat sekolah, PC dan PAC IPNU setempat perlu mempertimbangkan tentang keberadaan sekolah sebagaimana dalam pemetaan. PC dan PAC IPNU tidak menyamaratakan pembentukan dan peran komisariat ditiap – tiap sekolah. Keberadaan komisariat sekolah di sekolah Maarif tidak bisa disamakan dengan komisariat sekolah di sekolah umum. Untuk itu, pembentukan dan peran komisariat sekolah IPNU mengacu pada 3 kondisi sekolah. Untuk sekolah yang berada dibawah koordinasi LP. Maarif NU, kimisariat sekolah IPNU dapat menggantikan peran OSIS. Untuk sekolah NU yang berada diluar garis koordinasi LP. Maarif NU, komisariat sekolah IPNU dapat menjadi pengganti OSIS atau setingkat UKS. Peran komisariat sekolah IPNU dalam hal ini sangat tergantung pada key person dan relasi yang dibangun dengan pihak – pihak terkait. Sementara, untuk sekolah umum, komisariat sekolah IPNU dapat menjadi UKS.

Adapun petunjuk pelaksanaan pembentukan komisariat sekolah meliputi dua hal, yaitu :

1) Sosialisasi atau pendekatan

Dalam pembentukan komisariat sekolah, PC dan PAC IPNU harus melakukan sosialisasi atau pendekatan. Sosialisasi atau pendekatan ini dimaksudkan untuk memperkenalkan visi, misi dan program kerja IPNU kepada beberapa pihak atau stakeholder yang terkait langsung secara teknis dalam proses pembentukan komisariat sekolah.

Untuk kebutuhan ini, maka sosialisasi atau pendekatan harus dilakukan oleh IPNU dalam berbagai strategi. Pertama, IPNU dapat melakukan sosialisasi atau pendekatan personal. Dalam melakukan pendekatan ini, IPNU harus mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan komdisi sekolah. Strategi pendekatan personal yang dilakukan IPNU terhadap sekolah umum tentu saja berbeda dengan sekolah dibawah koordinasi Maarif. Kedua, IPNU dapat melakukan sosialisasi atau pendekatan yang bersifat program. Sosialisasi atau pendekatan melalui program dapat dilakukan secara sama antar kondisi sekolah.

2) Didalam koordinasi LP. Ma'arif NU

Untuk kebutuhan ini, IPNU harus melakukan pendekatan dengan beberapa stakeholder terkait, yaitu :

a) Pendekatan dengan ketua LP. Maarif NU
    - Sowan atau silaturrahim kepada ketua LP. Maarif NU setempat
    - Memberi brosur, foto kegiatan terkait, dan dokumen terkait kepada ketua Maarif setempat
    - Meminta bantuannya dalam koordinasi dengan kepala sekolah
    - Menjaga komunikasi dengan ketua LP. Maarif NU setempat
b) Pendekatan dengan kepala sekolah
    - Sowan atau silaturrahim kepada kepala sekolah

- Memberi brosur, foto kegiatan terkait, dan dokumen terkait kepada kepala sekolah
- Mengundang kepala sekolah dalam beberapa kegiatan dan aktifitas IPNU yang terkait dengan pelajar
- Meminta izin untuk mendirikan komisariat sekolah IPNU
- Menjaga komunikasi aktif dengan kepala sekolah

c) Pendekatan kepada siswa
- Silaturrahim dan sosialisasi kepada organisasi siswa disekolah
- Memberi brosur, foto kegiatan terkait, dan dokumen terkait kepada siswa
- Sosialisasi tentang IPNU kepada siswa secara lebih besar atau menyeluruh
- Melakukan pendekatan kepada siswa senior berpengaruh dan dijadikan sebagai pioneer dalam komunitasnya
- Mengundang pengurus organisasi siswa sekolah atau siswa sekolah dalam kegiatan IPNU terkait.

3) Dilaur koordinasi LP. Ma'arif NU

Untuk sekolah dengan karakteristik ini, maka IPNU setempat perlu melakukan strategi pendekatan sebagai berikut :

a) Pendekatan dengan ketua NU
- Sowan atau silaturrahim kepada ketua NU setempat

- Memberi brosur, foto kegiatan terkait, dan dokumen terkait kepada ketua NU setempat
- Meminta bantuannya dalam koordinasi dengan kepala sekolah
- Menjaga komunikasi dengan ketua NU setempat

b) Pendekatan dengan kepala sekolah

- Sowan atau silaturrahim kepada kepala sekolah
- Memberi brosur, foto kegiatan terkait, dan dokumen terkait kepada kepala sekolah
- Mengundang kepala sekolah dalam beberapa kegiatan dan aktifitas IPNU yang terkait dengan pelajar
- Meminta izin untuk mendirikan komisariat sekolah IPNU
- Menjaga komunikasi aktif dengan kepala sekolah

c) Pendekatan kepada siswa

- Silaturrahim dan sosialisasi kepada organisasi siswa disekolah
- Memberi brosur, foto kegiatan terkait, dan dokumen terkait kepada siswa
- Sosialisasi tentang IPNU kepada siswa secara lebih besar atau menyeluruh
- Melakukan pendekatan kepada siswa senior berpengaruh dan dijadikan sebagai pioneer dalam komunitasnya

- Mengundang pengurus organisasi siswa sekolah atau siswa sekolah dalam kegiatan IPNU terkait

4) Sekolah umum

Untuk sekolah umum, IPNU setempat dapat melakukan pendekatan atau sosialisasi dengan strategi sebagai berikut :

a) Pendekatan dengan key person, jika key person bukan pemegang kebijakan sekolah atau tokoh yang berpengaruh dalam menentukan kebijakan
   - Sowan atau silaturrahim kepada key person
   - Memberi brosur, foto kegiatan terkait, dan dokumen terkait kepada key person
   - Meminta untuk menghubungkan dengan pemegang kebijakan disekolah atau tokoh berpengaruh dalam menentukan kebijakan sekolah
   - Menjaga komunikasi dengan key person

b) Pendekatan kepada kepala sekolah (key person adalah kepala sekolah) Sowan atau silaturrahim kepada kepala sekolah
   - Memberi brosur, foto kegiatan terkait, dan dokumen terkait kepada kepala sekolah
   - Mengundang kepala sekolah dalam beberapa kegiatan dan aktifitas IPNU yang terkait dengan pelajar
   - Meminta izin untuk mendirikan komisariat sekolah IPNU

- Menjaga komunikasi aktif dengan kepala sekolah

c) Pendekatan kepada guru
   - Sowan atau silaturrahim kepada guru
   - Memberi brosur, foto kegiatan terkait, dan dokumen terkait kepada guru
   - Mengundang guru dalam beberapa kegiatan dan aktifitas IPNU yang terkait dengan pelajar
   - Meminta bantuannya dalam proses mendirikan komisariat sekolah IPNU
   - Menjaga komunikasi aktif dengan guru

d) Pendekatan kepada siswa
   - Silaturrahim dan sosialisasi kepada organisasi siswa disekolah
   - Memberi brosur, foto kegiatan terkait, dan dokumen terkait kepada siswa
   - Sosialisasi tentang IPNU kepada siswa secara lebih besar atau menyeluruh
   - Melakukan pendekatan kepada siswa senior berpengaruh dan dijadikan sebagai pioneer dalam komunitasnya
   - Mengundang pengurus organisasi siswa sekolah atau siswa sekolah dalam kegiatan IPNU terkait
   - Menggunakan pendekatan pertemanan/kekerabatan /kelompok siswa yang sedang menempuh pendidikan disekolah tersebut
   - Menggunakan pendekatan secara intensif yang arif dan elegance, sehingga dapat membuat ketertarikan sendiri

untuk bergabung dengan IPNU sebagai wadah pengembangan diri dan mendirikan komisariat sekolah IPNU

5. Pendekatan program strategis

   Sosialisasi atau pendekatan melalui program dilakukan oleh PC dan PAC IPNU dengan membuat kegiatan atau program yang semenarik mungkin sehingga dapat diterima oleh para pelajar. Ketertarikan para pelajar tersebut nantinya diharapkan dapat menjadi faktor pendorong untuk terbentuknya komisariat sekolah IPNU – . Beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam menciptakan program atau kegiatan yang menarik pelajar antara lain :

   1) Mengembangkan wawasan intelektual keilmuan dengan membuat study club sebagai kajian berkala.
   2) Menyajikan nuansa kegiatan kyang kompetitif dan prestisius, seperti liga SMA, PORSENI, Debat Kontes, dan sebagainya.
   3) Melakukan aktivitas yang kreatif dan penyegaran diri seperti Festifal Qosidah, Pergelaran Seni Budaya, Lomba KIR, Lomba Cipta dan Baca Puisi dan sebagainya.
   4) Mengadakan kemasan kegiatan yang bernuansa penguatan jiwa keagamaan dan moralitas, misalnya persatuan terpadu remaja, tadabbur alam, safari rohani, dan sebagainya.
   5) Mengadakan kegiatan pelatihan, Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) dan sebagainya.

6. Prosedur pendirian komisariat sekolah IPNU
   1) Jumlah anggota sedikitnya 10 orang untuk IPNU dan 15 orang untuk
   2) Rapat anggota tahunan untuk deklarasi dan pemilihan pengurus Pimpinan Komisariat Sekolah
   3) Memilih Pimpinan Komisariat Sekolah untuk masa khidmad satu tahun (baca : satu periode)
      a) Syarat menjadi pimpinan komisariat sekolah:
         - Umur setinggi – tingginya 21 tahun untuk SMP dan SMA sederajat
         - Tercatat sebagai siswa sekolah setempat
         - Pendidikan serendah – rendahnya SMP atau sederajat
         - Pernah mengikuti MAKESTA
      b) Ketua komisariat sekolah dipilih langsung rapat anggota tahunan (RAT)
      c) Teknik pemilihan ditentukan melalui sidang rapat anggota tahunan
      d) Para pengurus lengkap dipilih oleh tim formatur
      e) Tim formatur terdiri atas :
         - Ketua terpilih (mandataris)
         - Perwakilan peserta (mewakili level kelas / jurusan)
         - Pengurus PAC / PC IPNU bagi sekolah
      f) Pimpinan komisariat sekolah disahkan oleh Pimpinan Cabang dengan rekomendasi pimpinan lembaga pendidikan.
7. Struktur pimpinan komisariat sekolah

   Struktur dan bagan pimpinan komisariat sekolah terdiri atas dewan pelindung, dewan

pembina, dan pimpinan komisariat. Dewan pelindung adalah merupakan pimpinan lembaga pendidikan. Dewan pembina terdiri atas 3 orang yang terdiri atas Waka Kesiswaan, guru dan senior atau alumni. Pimpinan komisariat sekolah terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara dan wakil bendahara serta beberapa departemen dan lembaga – lembaga sesuai dengan kebutuhan.

Struktur atau bagan Pimpinan Komisariat Sekolah adalah sebagai berikut:

SUSSUNAN PPENGURUS

PIMPINAN KOMISARIAT

IPNU ……………

Pelindung	:	Kepala Madrasah/sekolah/pondok
Pembina	:	Guru kesiswaan dan demisioner ketua
Ketua	:	
Wakil ketua 1	:	
Wakil ketua 2	:	
Skretaris	:	
Wakil Skretaris	:	
Bendahara	:	
Wakil bendahara	:	

Departemen dan Lembaga

Departemen Organisasi	:	**Koordinator**
		Anggota
		Anggota
Departemen Kaderisasi	:	**Koordinator**
		Anggota
		Anggota
Departemen Dakwah	:	**Koordinator**
		Anggota
		Anggota
Departemen Minat dan Bakat	:	**Koordinator**
		Anggota
		Anggota
Lembaga Ekonom Kewirausahaan dan Koperasi	:	**Koordinator**
		Anggota
		Anggota
Departemen Lembaga Pers Pelajar	:	**Koordinator**
		Anggota
		Anggota

8. Penguatan kelembagaan

Setelah terbentuknya komisariat sekolah, diperlukan adanya beberapa aktifitas untuk pengembangannya. Untuk itu, komisariat sekolah IPNU – perlu melakukan beberapa langkah praktis dan strategis pengembangan komisariat dengan merumuskan beberapa langkah sebagai berikut :

1) Legalisasi lembaga

Sebelum masuk pada pelaksanaan berbagai kegiatan komisariat, Pimpinan Komisariat perlu melakukan legalisasi organisasi. Legalisasi organisasi dapat ditempuh dengan cara :

a) Pengesahan pengurus. Yang berhak mengesahkan pengurus dalam hal ini adalah Pimpinan Cabang IPNU. Untuk mengajukan SK kepengurusan sebelumnya ketua terpilih menyusun kepengurusan yang terdiri atas : Pelindung dalam hal ini adalah kepala sekolah setempat, Dewan Pembina dalam hal ini adalah Waka Kesiswaan, beberapa wali murid, ketua yang dilengkapi dengan empat wakil ketua, sekretaris yang dilengkapi dengan empat wakil sekretaris, bendahara yang dilengkapi dengan empat wakil bendahara dan anggota departemen masing – masing berjumlah 5 orang yang dikoordinir oleh seorang ketua departemen. Pengajuan pengurus itu harus ditanda tangani oleh kepala sekolah bersangkutan dan juga ketua PAC setempat.

b) Setelah mendapat pengesahan dari PC IPNU setempat dilakukan pelantikan
c) Pemasangan papan nama IPNU (hal ini sangat dimungkinkan untuk sekolah yang berada dalam koordinasi LP. Maarif NU atau sekolah NU yang keberadaan key personya sangat kuat)
d) Penggunaan simbol atau lambang IPNU diseragam sekolah (hal ini sangat dimungkinkan untuk sekolah yang berada dalam koordinasi LP. Maarif NU atau sekolah NU yang keberadaan key personya sangat kuat)
e) Penggunaan identitas KTA (hal ini sangat dimungkinkan untuk sekolah yang berada dalam koordinasi LP. Maarif NU atau sekolah NU yang keberadaan key personya sangat kuat)
f) Penggunaan jas almamater (hal ini sangat dimungkinkan untuk sekolah yang berada dalam koordinasi LP. Maarif NU atau sekolah NU yang keberadaan key personya sangat kuat)

2) Aktifitas (disertai dengan petunjuk teknis dan pelaksanaan kegiatan)
Setelah pelantikan, pimpinan komisariat sekolah dapat melakukan berbagai aktifitas. Dalam pelaksanaannya, aktifitas komisariat meliputi dua hal, yaitu pengembangan organisasi serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) kader.
a) Pengembangan Organisasi

Pengembangan organisasi dalam pimpinan komisariat meliputi beberapa kegiatan, yaitu :

- Up Grading: Konsolidasi kepemimpinan dan organisasi

  Up Grading merupakan kegiatan konsolidasi pemimpin atau pengurus komisariat. Kegiatan ini biasanya dilakukan untuk mengenal lebih jauh personality masing – masing pengurus. Selain itu, kegiatan ini juga dilakukan untuk mempersatukan cara pandang dan visi – misi pengurus sehingga mereka mempunyai kesamaan dalam menjalankan amanah organisasi. Untuk mewujudkan kesamaan cara pandang dan visi – misi organisasi, para pimpinan komisariat dapat dibekali dengan pengetahuan terkait yang dipandu oleh Dewan Pembina, senior atau alumni. Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini adalah meliputi kepemimpinan (leadership), manajemen dan materi – materi yang erat kaitannya dengan teknik – teknik berorganisasi.
- Rapat Kerja Pengurus

  Kegiatan Rapat Kerja (RAKER) ini dimaksudkan untuk membuat program kerja, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pelaksanaan RAKER paling lama adalah tiga minggu pasca

pembentukan pengurus komisariat secara lengkap. Pelaksanaan kegiatan ini dapat dilangsungkan bersama dengan pelantikan. Jadi, setelah prosesi pelantikan, para pimpinan komisariat dapat berkumpul untuk merumuskan program kerja selama setahun ke depan.

kegiatan ini seyogyanya dihadiri oleh semua kader, senior, alumni dan pembina. Kehadiran para senior, alumni dan pembina dimaksudkan untuk memberikan sharing dan menumbuhkan ghirah (motivasi) pengurus dalam merumuskan dan mengimplementasikan program kerja. Sebelum masuk pada pembahasan tentang perumusan program kerja, alangkah baiknya jika senior, alumni dan pembina dapat memberikan pengarahan terlebih dahulu sehingga pimpinan komisariat mempunyai bekal dalam merumuskan program kerja. Hal ini juga dilakukan agar program kerja yang dirumuskan menjadi lebih terarah dan focus serta tepat sasaran.

➢ Rapat Anggota Tahunan

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan setahun sekali. Kegiatan ini dilangsungkan untuk beberapa hal, yaitu laporan pertanggung jawaban pimpinan komisariat dan pemilihan

ketua baru. Kegiatan ini juga dilakukan untuk membahas dan merumuskan mekanisme organisasi satu tahun ke depan. Selain itu, dalam kegiatan ini juga dapat diawali dengan seminar atau diskusi yang menghadirkan beberapa pembicara dengan berbagai materi actual, seperti kepemimpinan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Kegiatan ini dihadiri oleh semua kader sebagai anggota. Namun dalam pelaksanaannya, kegiatan ini juga sebaiknya menghadirkan dewan pembina, alumni dan senior.

b) Pengembangan SDM Kader

Pengembangan SDM kader di Pimpinan Komisariat meliputi dua hal. Pertama adalah pengembangan kaderisasi formal. Kedua adalah pengembangan kaderisasi informal.

- Pengembangan Kaderisasi Formal

  Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk meningkatkan dan mengembangkan SDM kader sebagaimana proses kaderisasi yang ada di organisasi IPNU – . Kegiatan pengembangan kaderisasi formal meliputi :

  1. MOP (Masa Orientasi Pelajar)

     Kegiatan ini berisi tentang pengenalan sekolah dan ke IPNU an. Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari. Materi yang

disampaikan dalam kegiatan ini adalah pengenalan tentang IPNU meliputi organisasi IPNU – , mars dan hymne pelajar NU. Materi lainnya adalah berupa teknik belajar yang baik, pengenalan lingkungan sekolah dan kepribadian pelajar.

JADWAL MOP

NO	HARI/JAM	MATERI	PELAKSANA
1.	07.00 - 08.00	Pembukaan/Apel pagi	Panitia
2.	08.00 - 09.30	Dinamika kelompok dan kontrak belajar	Panitia
3.	09.30 - 10.00	Istirahat	All
4.	10.00 - 11.00	Kepribadian pelajar	Trainer
5.	11.00 - 12.00	Materi ke IPNU an	Pemateri
6.	12.00 - 12.30	Sholat dzuhur berjama`ah	Panitia
7.	12.30 - 13.30	Pengumuman/Arahan panitia	Panitia
8.	13.30 - 14.30	Review materi	Trainer
Tugas membawa logo IPNU			
1.	06.30 - 07.00	Apel pagi	Panitia
2.	07.00 - 08.00	Teknik belajar	Trainer
3.	08.00 - 09.30	Materi ke-NU-an dan ke-ASWAJA-an	Trainer
4.	09.30 - 10.00	Istirahat	All
5.	10.30 - 11.00	Wawasan Lingkungan Sekolah	Pemateri
6.	11.00 - 12.00	Organisasi dan Ice breaking	Trainer
7.	12.00 - 12.30	Sholat dzuhur berjama`ah	Panitia
8.	12.30 - 14.00	Review materi	Trainer
Pemberian tugas harian			
1.	06.30 - 07.00	Apel pagi	Panitia
2.	07.00 - 08.30	Character building	Trainer

3.	08.30 - 10.00	Materi Bahaya kenakalan remaja	Pemateri
4.	10.00 - 10.30	Istirahat	All
5.	10.30 - 11.30	Game/Out bound	Trainer
6.	11.30 - 12.00	Gugus competition	Trainer
7.	12.00 - 12.30	Sholat dzuhur berjama`ah	Panitia

Untuk lebih lengkapnya pedoman MOP IPNU dapat diakses pada website resmi : *www.ipnu.or.id*

2. MAKESTA (Masa Kesetiaan Anggota)
   Kegiatan ini adalah pelatihan yang merupakan pintu masuk untuk menjadi anggota IPNU secara resmi. Materi yang disampaikan dalam pelatihan ini meliputi Ke Indonesiaan ke NU an, ke IPNU an, aswaja,keorganisasian,kepemimpinan dan pembaiatan. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kesadaran akan pentingnya berorganisasi dan membangun kemampuan dasar organisatoris kader.

   - Pengembangan Kaderisasi Informal
     Kegiatan ini terdiri atas berbagai aktifitas untuk meningkatkan dan

mengembangkan SDM kader diluar kaderisasi formal yang ada diorganisasi IPNU. Kegiatan pengembangan kaderisasi informal merupakan pendukung kaderisasi formal dalam pengembangan SDM kader. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan oleh komisariat sekolah dalam hal ini sebagai berikut :

1) Kegiatan–Kegiatan Monumental

   Untuk menumbuhkembangkan kualitas SDM kader di tingkat komisariat sekolah, perlu diselenggarakan program – program yang bersifat monumental. Salah satu contoh dari kegiatan ini adalah peringatan hari besar Islam (PHBI), refleksi romadlon, peringatan maulid Nabi, peringatan hari kemerdekaan dan sebagainya. Selain berfungsi untuk meningkatkan kualitas SDM kader, kegiatan ini juga dapat meningkatkan kemampuan kader dalam memanage organisasi. Pelaksanaan kegiatan ini dalam

bentuk kepanitiaan menumbuhkan kemampuan kader dalam memanage organisasi dan bekerja sama.

2) Diskusi

Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi kader. Selain itu, kegiatan ini juga dapat berfungsi untuk mengasah pemahaman kader mengenai perkembangan dan persoalan sosial yang terjadi dimasyarakat, bangsa, NU atau IPNU sendiri. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dalam bentuk diskusi kelompok (study club) dan curah pendapat (brain storming) yang dilaksanakan selama 1 bulan sekali dengan tema yang berbeda.

Tidak hanya itu, dalam diskusi ini para kader juga dapat belajar untuk menjadi nara sumber secara bergantian. Masing – masing kader dapat ditunjuk untuk menyiapkan materi diskusi sesuai dengan tema yang disepakati kemudian mempresentasikannya dalam diskusi. Hal ini dapat

meningkatkan kemampuan kader dalam menyampaikan materi dan memberikan argumentasi. Untuk lebih jelasnya, pelaksanaan kegiatan diskusi ini dapat merujuk pada table 3.

Tabel 3.
Petunjuk Pelaksanaan
Kegiatan Diskusi
Komisariat Sekolah

No	Materi	Pokok Bahasan	Tema
1	Aswaja	Pemahaman dan sejarah Aswaja	
		Prinsip – Prinsip Aswaja	Menerapkan prinsip Tawasuth, Tawazun, I'tidal, Amar Ma'ruf Nahi Mungkar dalam kehidupan sehari – hari.
		Tradisi perilaku keagamaan NU	• Tahlilan • Yasinan • Ratiban • Barzanji • Qunut • Mauludan dan sebagainya
2	Keorganisasian NU	Ke NU an	
		Ke IPNU an	
		Struktur NU Organisasi IPNU	

3	Kepemimpinan-Kepemimpinan	Manajemen Keorganisasian	a. Tipologi pemimpin Pemimpin yang baik b. Teknik menjadi pemimpin yang baik c. Apa itu Manajemen organisasi d. Bagaimana teknik memanajemen organisasi e. Prinsip – prinsip dalam memanajemen organisasi
4	Pendidikan dan Problematika pendidikan di Indonesia	Sistem Belajar Efektif	
		Pembentukan Kepribadian Pelajar Teknik Belajar Yang Baik	
		Pengenalan Lingkungan Sekolah	1. Apa saja masalah – masalah terkait dengan pendidikan yang ada di Indonesia 2. Mengapa masalah tersebut muncul 3. Bagaimana mengatasi masalah tersebut 4. Apa itu belajar efektif 5. Bagaimana menciptakan proses belajar yang efektif 6. Bagaimana strategi dan trik dalam menumbuhkan semangat

			belajar 7. Mengenal diri sendiri 8. Etika pergaulan belajar 9. Pentingnya ilmu pengetahuan 10. Solusi mengatasi kesulitan belajar 11. Mengenal sekolah dan ornament – ornamentnya 12. Mengenal lembaga – lembaga yang ada disekolah
5	Isu – Isu Aktual Peningkatan Skill	Kesehatan Reproduksi	1. Apa yang dimaksud dengan kesehatan reproduksi 2. Apa menstruasi, bagaimana prosesnya, apa dampak dari menstruasi, apa saja masalah terkait dengan menstruasi, bagaimana mengatasi masalah tersebut
		Public Speech	1. Bagaimana teknik menjadi MC 2. Bagaimana teknik menjadi moderator 3. Bagaimana teknik memberi sambutan atau pidato 4. Bagaimana teknik

			memimpin sidang
		Jurnalistik dan Literasi Digital	1. Pengetahuan literasi digital bagi pelajar untuk menangkal hoaks dan ujaran kebencian 2. Teknik penulisan berita 3. Teknik reportase dan wawancara 4. Desaign Grafis 5. Pengoptimalan gadget..
		Ekonomi Kreatif	1. Tantangan pelajar untuk berperan dalam ekonomi kreatif 2. Cara membuat konten produk 3. Cara memasarkan konten di media sosial 4. Belajar Photography produk
		Tim E Sport	1. E Sport berperan dalam mewadahi pelajar yang mempunyai potensi dibidangnya. 2. Pembuatan lomba E Sport ditingkat sekolah
8	Monumental	PHBI	Lomba – Lomba • Romadlon dan hari raya idul fitri
		PHBN	Hari kemerdekaan • Olah Raga dan

			sebagainya

3) Pengembangan Minat dan Bakat

   Dalam kegiatan ini, kader dapat menumbuhkan kreatifitasnya dalam bidang apapun, seperti jurnalistik (majalah dinding, KIR, dan lain – lain), kesenian, olah raga dan sebagainya

4) Kegiatan Sosial Kemasyarakatan

   Kegiatan ini dapat berupa donor darah, bakti sosial, kemah pelajar, cinta alam dan sebagainya. Kegiatan ini dapat menumbuhkan kepekaan sosial para kader sejak dini.

5) Mentoring Untuk melihat perkembangan dari masing – masing kader, IPNU ditingkat komisariat sekolah perlu adanya proses mentoring.

   Pelaksanaan mentoring terhadap perkembangan PK IPNU dilaksanakan oleh PAC dimana PK tersebut berada. PAC yang bertanggung jawab untuk melakukan mentoring PK adalah bagian kaderisasi dan organisasi.

Pelaksanaan mentoring pengembangan PK IPNU tidak hanya tanggung jawab PAC saja. Mentoring mengenai pengembangan PK IPNU juga menjadi tugas dan tanggung jawab dari pengurus PK.

Untuk kebutuhan mentoring tersebut, maka setiap PK perlu membentuk study club atau kelompok – kelompok kecil. Study club atau kelompok tersebut terdiri atas 10 – 12 orang anggota. Study club atau kelompok ini selanjutnya mengadakan pertemuan rutin. Pertemuan rutin tersebut diharapkan dapat menjadi wadah penguatan emosional anggota / kader. Oleh karena itu, pertemuan rutin tersebut dapat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan, seperti diskusi, rujakan, outbond, road show dan sebagainya.

Dalam perjalannya, study club atau kelompok kecil tersebut didampingi dan dibimbing oleh salah satu dari PAC. Pendamping dan pembimbing studi club atau kelompok kecil tersebut

berfungsi untuk mendampingi setiap kegiatan yang dilaksanakan dan membimbing pelaksanaan kegiatan study club atau kelompok kecil. Pendamping atau pembimbing tersebut juga bertugas untuk memberikan motivasi bagi setiap anggota kelompok yang didampinginya.

Proses monitoring pengembangan kader perlu dilakukan secara berkala oleh pengurus komisariat sekolah. Monitoring dapat dilakukan melalui kelompok – kelompok study club yang ada. Pengurus PK sekolah perlu melakukan meeting secara berkala untuk mengetahui perkembangan setiap kader dimasing – masing kelompoknya.

Pelaksanaan monitoring dapat dilakukan dalam beberapa bentuk kegiatan atau startegi. Beberapa kegiatan dan strategi yang dapat dilakukan untuk memonitor pelaksanaan kegiatan komisariat sekolah adalah sebagai berikut :

a) Mengadakan pertemuan secara periodik.

hal ini dilakukan untuk mengetahuikinerja komisariat setelah dibentuk. Termasuk dalam hal ini adalah program kerja dan kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan, sertabagaimana perkembangan kegiatan tersebut terhadap perkembangan, motivasi dan kualitas kader.

b) Menginventarisir Kebutuhan komisariat selama 1 tahun kepengurusan.

Target dari pelaksanaan monitoring adalah pengawasan aktivitas dan evaluasi. Pengawasan aktivitas meliputi cek capaian, hambatan dan lain – lain. Sementara evaluasi dilaksanakan untuk meniali apa saja yang telah dilakukan, hambatan – hambatan dan rekomendasi.

Selain monitoring oleh PK sekolah sendiri, monitoring terhadap perkembangan PK sekolah

juga perlu dilakukan PAC yang membawai PK sekolah dengan mengadakan pertemuan secara periodik untuk melakukan evaluasi. Evaluasi tersebut dilakukan untuk mengetahui kinerja komisariat setelah dibentuk, program dan kegiatan apa saja yang telah dilakukan serta perkembangan dari kader atau anggota PK sekolah.

Dalam pelaksanaannya, proses monitoring juga memerlukan peran dari pihak – pihak atau lembaga – lembaga lain yang terkait. Pihak – pihak atau lembaga – lembaga yang dibutuhkan partisipasinya dalam proses monitoring adalah PC IPNU, pihak sekolah, MWC NU dan sebagainya.

Terkait dengan hal ini, PAC IPNU dapat melibatkan pihak tersebut dalam monitoring melalui pertemuan bersama dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan PK sekolah.

Selanjutnya, PAC IPNU dapat menindaklanjuti hasil evaluasi untuk menjadi bahan perbaikan bagi perkembangan PK IPNU ke depannya.

BAB EMPAT
MAKESTA UNGGULAN (PENETRASI SEKOLAH NEGERI)

A. Latar Belakang

Sejak berubahnya nama IPNU dari (Ikatan Putra Nahdlatul Ulama') menjadi (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama') pada Kongres ke XIV di Asrama Haji Sukolilo Surabaya pada 18 – 23 Juni 2003 hingga sekarang pergerakan keterpelajaran IPNU dirasa kurang maksimal. Dengan Jargon *Back To School* yang selalu didengungkan dari setiap periode ke periode mengalami sebuah proses dan progres yang beragam. Alhasil setiap forum PBNU mulai dari Munas hingga Muktamar kinerja Organisasi yang selama ini menjadi Gerbang Awal kaderisasi NU selalu dipertanyakan. Hingga akhirnya dari periode ke periode usia IPNU selalu diturunkan.

Salah satu hal yang paling krusial dipertanyakan adalah bagaimana peran IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama) dalam mengawal Pelajar yang berada di Sekolah Negeri. Oleh sebab itu langkah strategis telah dirumuskan dalam Konferensi Besar dan Rapat Kerja Nasional tahun 2019 tentang *Back To School* nya IPNU.

Selain itu problem kebangsaan tentang Nasionalisme ditingkat pelajar selama lima tahun belakangan ini memiliki krisis yang harus siap ditanggulangi oleh IPNU. Perkembangan arus informasi digital yang semakin hari semakin berkembang membuat aneka ragam ideologi yang

bersifat mengikis Nasionalisme dalam jiwa Pelajar sangatlah tak terbendung, terkhusus para pelajar yang berada disekolah Negeri Favorit.

Oleh sebab itu IPNU harus lekas hadir dalam dunia Pelajar Sekolah Negeri sebagai upaya peneguhan kembali harokah IPNU Back To School dan Misi Penjaga serta pengawal Nasionalisme dalam dunia keterpelajaran di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.

B. Nama dan Tema Kegiatan

Nama program ini “MAKESTA Unggulan ”, dengan tema *“Dari Pelajar untuk Agama, Bangsa, dan Negeri”*.

C. Tujuan dan Target Program

1. Tujuan Program

a. Umum :

Terbentuknya pelajar bangsa yang bertaqwa kepada Allah SWT, berilmu, berakhlak mulia, berwawasan kebangsaan dan kebhinekaan serta bertanggung jawab atas terlaksananya syari’at Islam *Ahlussunnah Wal Jama’ah* yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi tegaknya NKRI.

b. Khusus:

1. Membentuk pelajar yang berjiwa Nasionalisme.
2. Mempersiapkan kader-kader pemimpin militan yang berwawasan intelektual dan berjiwa spiritual sebagai penerus perjuangan bangsa.

3. Memberikan pemahaman ajaran Islam *Ahlussunah Wal Jama'ah* para pelajar sekolah negeri dengan baik dan benar.
4. Mengajak para pelajar sekolah negeri untuk bisa mempunyai semangat dan jiwa kebangsaan yang berdasarkan ideologi Pancasila.

2. Target Program

Target dari Program **"MAKESTA Unggulan "** ini adalah :

a. Terlahirnya para pelajar berjiwa Nasionalis yang bisa diandalkan untuk masa depan.
b. Lahirnya pelajar Nasionalis yang berasal dari sekolah-sekolah negeri unggulan/ Favorit.

D. Peserta Program

Peserta dari *MAKESTA Unggulan* ini adalah perwakilan pelajar sekolah negeri unggulan yang ada di kabupaten/Kota sebanyak 50 siswa di setiap Kabupaten / Kota. Peserta dari hasil kegiatan ini akan menjadi pelajar Nasionalis di masing-masing Kabupaten / Kota dan setiap Pelajar diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan yang sama.

Kegiatan ini yang akan diikuti oleh 50 peserta yang terdiri dari 25 putra dan 25 putri. Adapun syarat ketentuan peserta sebagaimana berikut :

1. Beragama Islam
2. Peserta adalah siswa/siswi berasal dari sekolah negeri unggulan di Kabupaten/Kota yang duduk di kelas X.

3. Peserta adalah siswa/siswi yang aktif di organisasi intra sekolah.
4. Melengkapi administrasi :
   a. Mengisi Formulir Peserta
   b. Menyerahkan pas Foto 3x4 (2 Lembar)
   c. Melampirkan Surat Keterangan Aktif Berorganisasi (OSIS, Pramuka, PMR, Lembaga Pers Sekolah)
   d. Melampirkan Surat Mandat dari Kepala Sekolah
   e. Membuat Artikel dengan tema : **"Aksi Hadirku untuk Agama, Bangsa dan Negeri"**

E. Konstruksi Materi

Konstruksi materi dalam pelaksanaan kegiatan *MAKESTA Unggulan*antara lain sebagai berikut :

1. Ke Indonesia an; *"Jiwa Nasionalis pada Pelajar"*
2. Keislaman; *"*Membumikan *Islam Rahmatal lil 'Alamin"*
3. Keorganisasian; "Rajin Belajar, Aktif Berorganisasi!"
4. Islam dan NKRI; "Pelajar Berjiwa Religius Nasionalis"
5. Leadership; "Pelajar Hari ini, Pemimpin Masa Depan"
6. Tips Pelajar Kreatif; "Belajar masa kini, sukses masa depan"
7. Public Speaking; "Menjadi Public Speaker yang cakap"

F. Manual Acara

Adapun manual acara kegiatan ini sebagaimana dibawah ini.

MANUAL ACARA
MAKESTA UNGGULAN

No	Waktu	Kegiatan/Materi	Penanggungjawab
Hari dan Tanggal			
1	11.00 – 13.00	Registrasi Peserta	Kesekretariatan
2	13.00 – 14.30	Pembukaan MAKESTA Unggulan , 1. Pembukaan 2. Pembacaan ayat suci al-Quran 3. Menyanyikan lagu : • Indonesia Raya • Mars IPNU • Mars Syubbanul Wathan 4. Sambutan-sambutan : • Ketua PC IPNU • Ketua PW IPNU • Ketua PCNU *5.* Keynote Speaker " Ayo Menjadi Pelajar Nasionalis" *Kepala Daerah (Bupati/ Walikota)* 6. Doa 7. Penutup	Sie. Acara
3	14.30 – 15.30	Perkenalan dan Curah Gagasan	Instruktur
4	15.30 – 16.00	*Coffee Break*	All
5	16.00 – 17.30	Materi 1 **Ke Indonesia An : "*Jiwa Nasionalis pada Pelajar*"**	Instruktur
6	17.30 – 19.00	ISHOMA	All
7	19.00 – 20.30	Materi 2 **Keislaman : "Membumikan Islam Rahmatal Lil 'Alamin'**	Instruktur
8	20.30 – 22.00	Nobar Film **"Sang Kyai"**	Instruktur
9	22.00 – 03.00	Istirahat	All
Hari dan tanggal			

10	03.00 – 04.00	Doa dan Dzikir Bersama	All
11	04.00 – 05.00	Shalat Subuh dan Tadarus al-Quran	All
12	05.00 – 06.00	Olahraga	DKC CBP KPP
13	06.00 – 07.30	Bersih Diri dan Sarapan	All
14	07.30 – 09.00	Materi 3 **Islam dan NKRI : "Pelajar Berjiwa Religius Nasionalis"**	Instruktur
15	09.00 – 09.30	*Coffee Break*	All
16	09.30 – 11.00	Materi 4 **Keorganisasian: "Rajin Belajar, Aktif Berorganisasi!"**	Instruktur
17	11.00 – 12.30	ISHOMA	All
18	12.30 – 14.00	Materi 5 **Leadership : "Pelajar Hari ini, Pemimpin Masa Depan"**	Instruktur
19	14.00 – 15.30	Materi 6 **Tips Pelajar Kreatif; "Belajar masa kini, sukses masa depan"**	Instruktur
20	15.30 – 16.00	Shalat Ashar	All
21	16.00 – 17.30	Wisata Rohani	All
22	17.30 – 19.30	ISHOMA	All
23	19.30 – 21.30	Materi 7 **Public Speaking : "Menjadi Public Speaker yang cakap"**	Instruktur
24	21.30 – 22.30	Review Materi	Instruktur
25	22.30 – 02.00	Istirahat	All
Hari dan tanggal			
26	02.00 – 04.00	Ikrar Pelajar Unggulan	All
27	04.00 – 05.00	Shalat Subuh dan Tadarus al-Quran	All
28	05.00 – 06.00	Persiapan Outbond	All
29	06.00 – 09.00	Outbond	All
30	09.00 – 10.00	Bersih Diri	All
31	10.00 – 10.30	Post Test	Instruktur
32	10.30 – 11.30	RTL	All
33	11.30 – 12.30	Penutupan	All

FORM PENDAFTARAN

MAKESTA Unggulan (Penetrasi Sekolah Negeri)

Data Pribadi

Nama	:	....
Tempat, Tanggal Lahir	:	....
Jenis Kelamin	:	....
Utusan	:	....
Alamat Rumah		....
		....
Alamat Domisili	:	....
		....
		....
No. Handphone (WA)	:	....
Email	:	....
Facebook	:	....
Twitter	:	....
Instagram	:	....
Cita - cita	:	....
Motto	:	....
Motivasi	:	....

Mengikuti kegiatan ....

Riwayat Pendidikan Formal

: 1. ....

: 2. ....

: 3. ....

: 4. ....

Riwayat Pendidikan Non-Formal

: 1. ....

: 2. ....

: 3. ....

: 4. ....

Pengalaman Organisasi

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun

...................., ... 202

P**eserta MAKESTA Unggulan**

(___________________)

BAGIAN LIMA
PENUTUP

Demikian buku ini disusun dengan harapan semoga dapat memberikan manfaat kepada generasi muda NU yang ada di sekolah dan pesantren. Melalui juklak ini diharapkan keberadaan kader – kader NU yang ada disekolah dan pesantren mampu membawa misi untuk memperjuangkan NU tetap pada jalan yaitu : Untuk Kemaslahatan Ummat dan Menjadi Pengayom Kepada Semua Golongan.

Buku pedoman pendirian IPNU Komisariat sekolah ini masih banyak kekurangan. Untuk itu harapan besar dari penyusun adanya masukan dari berbagai pihak demi sempurnanya buku ini. Dan kepada semua Pimpinan IPNU disemua tingkat agar senantiasa berjuang untuk secara optimal mengimplementasikan isi dan ketentuan dari buku pedoman ini. SELAMAT BELAJAR, BERJUANG DAN BERTAQWA

Lampiran I - Contoh Papan Komisariat IPNU



Lampiran II - Contoh Sertifikat Kelulusan MAKESTA

I.P.N.U

SERTIFIKAT PELAJAR IPNU

No: 001/13/01/MOP/7354/V/22

Diberikan Kepada

MUHAMMAD SALAH

Lahir di Yogyakarta pada **27 Maret 2006**
Telah menyelesaikan dan memenuhi persyaratan
Masa Orientasi Pelajar (MOP)
dan dinyatakan **Lulus**

Yogyakarta, 17 Djulhijjah 1443 H
17 Juli 2022 M

Kepala Sekolah MA WAHID HASYIM	PIMPINAN KOMISARIAT IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA MA WAHID HASYIM
H. M. Muhajir	**MUCHAMMAD ADNAN** *Ketua*

MASA ORIENTASI PELAJAR

Pimpinan Komisariat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama
MA Wahid Hasyim Yogyakarta, 16-17 Juli 2022

1. Ke-IPNU-an	89	B
2. Ke-Aswaja-an	90	A
3. Wawasan Lingkungan Sekolah	85	B
4. Ke-Organisasi-an	90	A
5. Bahaya Kenakalan Remaja	95	A

Yogyakarta, 17 Djulhijjah 1443 H
17 Juli 2022 M

PIMPINAN KOMISARIAT
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA
MA WAHID HASYIM

MUCHAMMAD ADNAN *Ketua*	**MUHAMMAD HUSNI MUBARAK** *Sekretaris*



Sertifikat

No: 001/13/01/MU/7354/V/22

Kami berikan kepada :

MUHAMMAD SALAH

Lahir di Yogyakarta pada **27 Maret 2006**

Asal SMA 03 Yogyakarta

Alamat : Jl. Yogyakarta - Solo babarsari Kec Depok Selman Yogyakarta

Telah menyelesaikan dan memenuhi persyaratan **Masa Kesetiaan Anggota Unggulan** dan dinyatakan **Lulus**

Yogyakarta, 17 Djulhijjah 1443 H
17 Juli 2022 M

MENGETAHUI BUPATI KOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	**PIMPINAN CABANG IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA KAB. KOTA YOGYAKARTA**
SUMADI, S.H., M.H.	**MUCHAMMAD ILHAM** *Ketua*

KH. M. Tolchah Mansoer




الادارة العالية لجمعية
N
U
نهضة العلماء
١٣٤٤
1926





Diterbitkan oleh: Sekretariat Umum Pimpinan Pusat
Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Gedung PBNU Lantai 5
Jl. Kramat Raya No.164 Jakarta Pusat 10430 Telp (021)
3156480 / 08155555754 email:
setjen.ppipnu@gmail.com website: www.ipnu.or.id